

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Inflasi, dan Pengangguran

Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Setyo Novianto

Nomor Mahasiswa : 14313186

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN JUDUL

**Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Inflasi, dan Pengangguran
Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Setyo Novianto

Nomor Mahasiswa : 14313186

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Maret 2018

Penulis.



Setyo Novianto

PENGESAHAN

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ipm, Inflasi, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah

Oleh:

Nama : Setyo Novianto

Nomor Mahasiswa : 14313186

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 12 Maret 2018

Telah disusun, disetujui, dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Heri Sudarsono S.E., M.Sc.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, IPM, INFLASI, PENGANGGURAN
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KAB/KOTA JAWA TENGAH**

Disusun Oleh : **SETYO NOVIANTO**

Nomor Mahasiswa : **14313186**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 10 April 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Heri Sudarsono, SE.,MEc

Penguji : Awan Setya Dewanta, Drs .,M.Ec.Dev.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

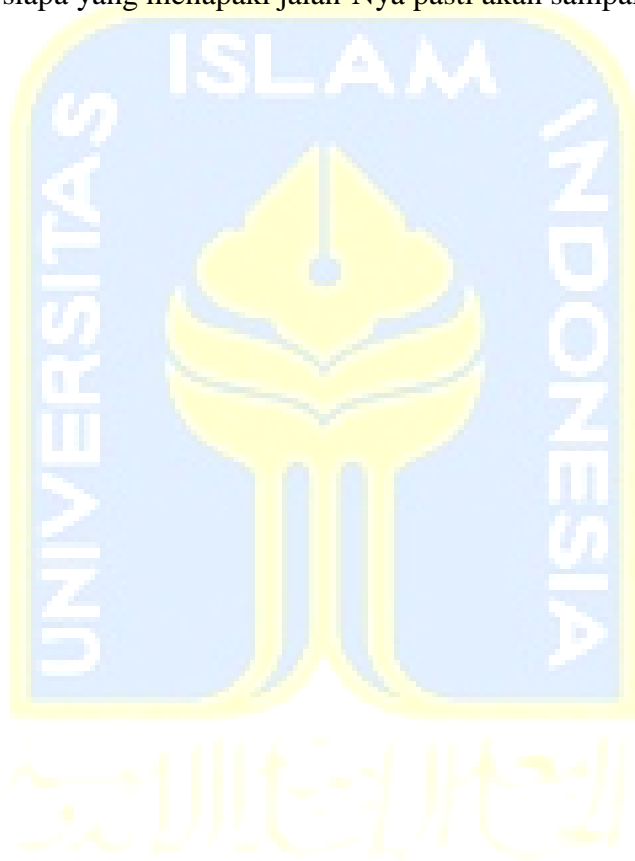


Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

“Man Sara Ala Darbi Washala”

“Barang siapa yang menapaki jalan-Nya pasti akan sampai tujuan.”



PERSEMBAHAN

Dalam halaman persembahan ini saya akan mempersembahkan tugas akhir ini untuk seluruh keluarga besar saya, terutama kedua Orang Tua yang begitu besar jasa mereka untuk bisa mengantarkan saya hingga detik ini. Sampai pada saatnya tiba, saya pun akan segera kembali kepada mereka, dengan membawa sebuah kebanggaan yakni membawa gelar SARJANA EKONOMI.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam serta junjungan besar kami Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Inflasi, dan Pengangguran, Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.**

Sejalan dengan terselesaikannya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengungkapkan Terima Kaih Kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bambang Prasetyo dan Prihatiningsih yang selalu mendoakan saya agar kelak menjadi orang yang sukses, berguna bagi bangsa dan negara. Atas kepedulian beliau yang tiada henti menanyakan skripsi sehingga dapat memotifasi saya bisa mengerjakan skripsi ini agar cepat lulus.
2. Adikku satu-satunya Diki Setyawan yang sangat menginginkan mendatangi wisuda kakaknya yang membuat saya terdorong untuk lebih giat mengerjakan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing Heri Sudarsono S.E., M.Sc. yang sudah membimbing saya dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyusun skripsi ini dengan baik.

4. Teman – teman Ilmu Ekonomi angkatan 2014 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu mengingatkan membantu satu sama lain dalam mengerjakan skripsi.
5. Teman KKN unitk 163 yang selalu memotivasiku Sad Harimas, Anggi, Mayong, Ageng, Acha, Dina, Lutfa, dan Alin agar tetap semangat untuk mengerjakan skripsi.
6. Fakultas Ekonomi khususnya prodi Ilmu Ekonomi yang sudah menjadi tempat saya mencari ilmu hingga memperoleh gelar S.E.
7. Serta semua pihak yang telah membantu penulisan dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang sudah diberikan kepada penulis kelak dapat dibalas dengan sepadan oleh Allah SWT. Akhir kata, penulis mengharapkan tugas akhir yang telah dibuat ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2018

Penulis.

Setyo Novianto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Batasan Masalah.....	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Manfaat Penelitian.....	13
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Landasan Teori	22
2.2.1 Kemiskinan.....	22
2.2.1.1 Definisi Kemiskinan.....	22

2.2.1.2	Penyebab Kemiskinan	22
2.2.1.3	Ukuran Kemiskinan.....	23
2.2.2	Pertumbuhan Ekonomi	24
2.2.2.1	Definisi Pertumbuhan Ekonomi	24
2.2.2.2	Teori Pertumbuhan Ekonomi	25
2.2.2.3	Alat Ukur Pertumbuhan Ekonomi.....	26
2.2.2.4	Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan	29
2.2.3	Indeks Pembangunan Manusia	29
2.2.3.1	Definisi Indeks Pembangunan Manusia	29
2.2.3.2	Komponen Indeks Pembangunan Manusia	30
2.2.3.3	Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan	30
2.2.4	Inflasi.....	31
2.2.4.1	Definisi Inflasi	31
2.2.4.2	Jenis – Jenis Inflasi.....	32
2.2.4.3	Dampak Inflasi	33
2.2.4.4	Teori - Teori Inflasi	34
2.2.4.5	Hubungan Inflasi Terhadap Kemiskinan.....	36
2.2.5	Pengangguran	37
2.2.5.1	Definisi Pengangguran	37
2.2.5.2	Jenis – Jenis Pengangguran	37

2.2.5.3 Hubungan Pengangguran Terhadap Kemiskinan	40
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	41
2.4 Hipotesis Penelitian.....	42
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis dan Sumber Data	43
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	43
3.2.1 Variabel Dependen	43
3.2.2 Variabel Indenden.....	43
3.3 Metode Pengumpulan Data	48
3.4 Metode Analisis Data	48
3.5 Model Regresi Data Panel.....	49
3.6 Menentukan Model Estimasi.....	51
3.6.1 Uji Chow (<i>Chow Test</i>).....	51
3.6.2 Uji Hausman (<i>Hausman Test</i>)	52
3.7 Uji Hipotesis.....	53
3.7.1 Uji Koefisien Regresi Secara Bersema – Sama (Uji F).....	53
3.7.2 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t).....	53
3.7.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)	54
BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Analisis Deskriptif Statistik	55
4.2 Pengujian Kesesuaian Model	57

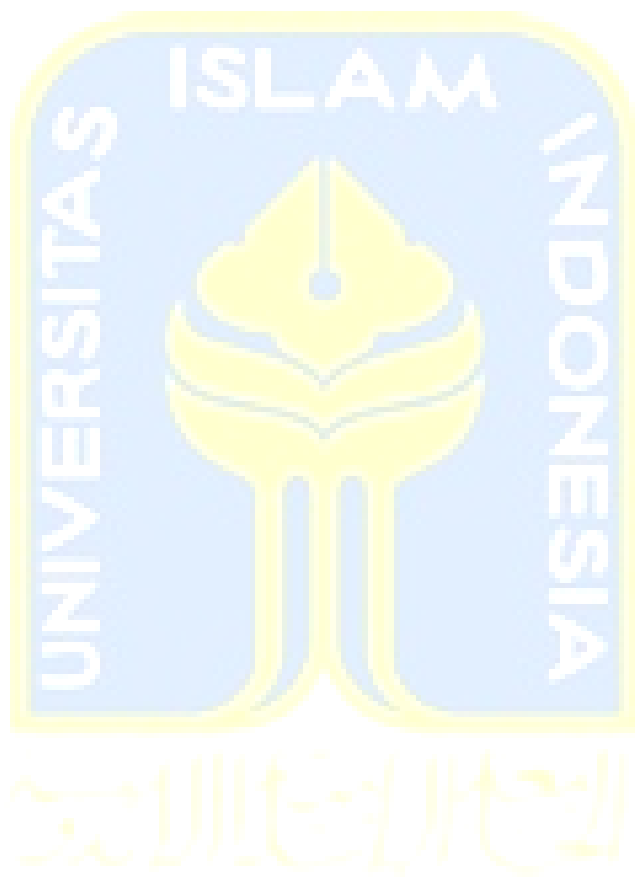
4.2.1 Uji Chow (<i>Chow Test</i>).....	57
4.2.2 Uji Hausman (<i>Hausman Test</i>)	58
4.3 Model Regresi Panel Random Effect	60
4.4 Pengujian Hipotesis.....	72
4.4.1 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama – Sama (Uji F).....	72
4.4.2 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t).....	73
4.4.3 Koefisien Determinasi (Uji R^2)	74
4.5 Pembahasan.....	74
BAB 5 KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	79
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Implikasi.....	80
5.3 Rekomendasi	83
DAFTAR PUSTAKA	84
DAFTAR LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2016.....	3
1.2 Persentase Kemiskinan Enam Provinsi di Pulau Jawa 2011 – 2016....	4
1.3 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan Jawa Tengah 2011 – 2016.....	5
1.4 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota Jawa Tengah (persen) 2011 – 2016.....	6
1.5 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah Tahun 2011 – 2016.....	7
1.6 Inflasi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota 2011 – 2016.....	9
1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah 2011 – 2016.....	11
2.1 Kajian Pustaka.....	17
4.1 Analisis Statistik Deskriptif	56
4.2 Hasil Uji Chow Test	58
4.3 Hasil Uji Hausman Test	59
4.4 Hasil Estimasi Random Effect Models	60
4.5 Intersep Random Effect Kabupaten/Kota Jawa Tengah.....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan yang terjadi di negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit, namun di beberapa negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam segi hal produksi dan pendapatan nasional. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut (Christianto, 2013). Indonesia adalah negara yang masih tergolong negara berkembang, dan kemiskinan merupakan masalah yang menjadi pusat perhatian.

Pemerintah Indonesia menyadari salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja perekonomian adalah dengan cara melakukan pembangunan nasional agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menata kehidupan yang layak demi mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Berbagai program dan kegiatan pembangunan telah diarahkan terutama pada pembangunan daerah, khususnya daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Pembangunan daerah tentunya harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas kebutuhan masing-masing daerah. Sasaran pembangunan nasional telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin (Dermoredjo, 2003).

Permasalahan strategis (problem nasional) yang juga dihadapi oleh Provinsi Jawa Tengah adalah masalah masih tingginya angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Jawa Tengah bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Kemiskinan dirasa masih menjadi permasalahan yang cukup serius, hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang masih kekurangan bahan makanan, sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup dan masih banyak masyarakat menjadi pengangguran. Ini menandakan bahwa kemiskinan di Indonesia masih memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat (Wijayanto, 2010).



Tabel 1.1

Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2016

Provinsi	Persentase (%)	Peringkat
Papua	28.4	1
Papua Barat	24.88	2
Nusa Tenggara Timur	22.01	3
Maluku	19.26	4
Gorontalo	17.63	5
Bengkulu	17.03	6
Aceh	16.43	7
Nusa Tenggara Barat	16.02	8
Sulawesi Tengah	14.09	9
Lampung	13.86	10
Sumatera Selatan	13.39	11
Jawa Tengah	13.19	12
DI Yogyakarta	13.1	13
Sulawesi Tenggara	12.77	14
Jawa Timur	11.85	15
Sulawesi Barat	11.19	16
Sumatera Utara	10.27	17
Sulawesi Selatan	9.24	18
Jawa Barat	8.77	19
Jambi	8.37	20
Sulawesi Utara	8.2	21
Kalimantan Barat	8	22
Riau	7.67	23
Sumatera Barat	7.14	24
Kalimantan Utara	6.99	25
Maluku Utara	6.41	26
Kalimantan Timur	6	27
Kep. Riau	5.84	28
Banten	5.36	29
Kalimantan Tengah	5.36	30
Kep. Bangka Belitung	5.04	31
Kalimantan Selatan	4.52	32
Bali	4.15	33
DKI Jakarta	3.75	34

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Dari tabel diatas persentase penduduk miskin provinsi pada tahun 2016 Jawa Tengah berada di posisi ke 12 dari 34 provinsi di Indonesia.

Tabel 1.2
Persentase Kemiskinan Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011 – 2016 (persen)

No	Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
1	DI Yogyakarta	16,08	15,88	15,03	14,55	13,16	13,10	14,94
2	Jawa Tengah	15,76	14,98	14,44	13,58	13,32	13,19	14,44
3	Jawa Timur	13,85	13,08	12,73	12,28	12,28	11,85	12,84
4	Jawa Barat	10,65	9,88	9,61	9,18	9,57	8,77	9,78
5	Banten	6,32	5,71	5,89	5,75	5,75	5,36	5,83
6	DKI Jakarta	3,75	3,70	3,72	4,09	3,61	3,75	3,77

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional/National Socio Economic BPS Provinsi Jawa Tengah

Bila dibandingkan dengan lima provinsi lain di pulau jawa, rata – rata tingkat kemiskinan Jawa Tengah berada di posisi kedua dibawah DI Yogyakarta dengan rata – rata persentase kemiskinan 14,44 persen..

Berbagai kebijakan dan program - program telah dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. namun masih jauh dari induk permasalahan dan belum membuahkan hasil yang memuaskan.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan Jawa Tengah
2011 - 2016

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase (%)
2011	5 317,39	16,20
2012	4 952,06	14,98
2013	4 811,34	14,44
2014	4 561,83	13,58
2015	4 505,78	13,32
2016	4 493,75	13,19

Sumber/Source: Survei Sosial Ekonomi Nasional/National Socio Economic Survey

Dari tabel 1.3 terlihat bahawa hasil upaya yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam rangka menanggulangi kemiskinan memperlihatkan hasil yang cukup baik. Jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan di Jawa Tengah dalam kurun waktu enam tahun terakhir selalu mengalami penurunan.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor itu diantaranya pertumbuhan ekonomi yang lambat, indeks pembangunan manusia yang rendah, inflasi yang tinggi, dan meningkatnya jumlah pengangguran.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan. Sedangkan tujuan yang paling utama dari suatu pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan kapasitas

produksi. Peningkatan kapasitas produksi membutuhkan tambahan tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran turun dan tingkat kemiskinan akan berkurang.

Menurut (Wiguna, 2013) dalam suatu proses pertumbuhan ekonomi, salah satu indikator yang digunakan untuk melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara atau wilayah adalah menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui PDRB, dapat terlihat kegiatan ekonomi yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh suatu negara atau daerah selama periode tertentu.

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Jawa Tengah (persen)
2011 – 2016

Tahun	PDRB (Persen)
2011	5,68
2012	5,17
2013	5,54
2014	5,10
2015	5,45
2016	5,72

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Dari tabel 1.4 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama enam tahun terakhir mengalami fluktuasi.

Diambil dari data Bank Dunia pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 sebesar 5 persen. Provinsi Jawa Tengah memiliki pertumbuhan diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang berfluktuatif dari tahun ke tahun tetapi mengalami trend yang positif berarti disaat PDRB meningkat dibarengi menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Jawa Tengah.

Cara kedua adalah dengan menggunakan pembangunan manusia. Pembangunan manusia dapat dilakukan dengan melakukan investasi pada bidang – bidang seperti pendidikan dan kesehatan yang memberikan manfaat bagi penduduk miskin. Murahannya fasilitas pendidikan dan kesehatan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas yang dibarengi dengan meningkatnya pendapatan.

Kualitas sumber daya manusia dapat diketahui dengan melihat indeks kualitas hidup atau indeks pembangunan manusia. Rendahnya indeks pembangunan manusia akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja seseorang. Produktivitas yang rendah berdampak pada pendapatan dan mengakibatkan jumlah kemiskinan bertambah.

Tabel 1.5
Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah Tahun 2011 – 2016

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Rata – Rata Lama Sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM	Peringkat IPM Nasional
2011	72,91	6,74	11,18	9296,4	66,64	14
2012	73,09	6,77	11,39	9497,1	67,21	15
2013	73,28	6,80	11,89	9617,9	68,02	13
2014	73,88	6,93	12,17	9639,7	68,78	13
2015	73,96	7,03	12,38	9929,7	69,49	12
2016	74,02	7,15	12,45	10,153,0	69,98	13

Sumber: Badan Pusat Statistik

Mulai tahun 2010, BPS menggunakan metode baru dalam penghitungan IPM. Komponen IPM yang baru terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Batasan usia dalam penghitungan RLS yang semula 15 tahun ke atas (15+), sekarang menjadi 25

tahun ke atas (25+); perubahan juga terjadi pada jumlah basket komoditi dalam penghitungan pengeluaran per kapita disesuaikan, dimana pada metode lama hanya terdiri dari 27 komoditas, dan sekarang mencapai 96 komoditas.

Dari tabel 1.5 dapat dilihat bahwa IPM Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2016. Peningkatan IPM setiap tahunnya menyebabkan naiknya produktivitas kerja seseorang. Produktivitas naik berdampak pada pendapatan dan mengakibatkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah turun dari tahun 2011 hingga 2016. Apabila IPM mengalami peningkatan dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan. Jika kesejahteraan meningkat tingkat kemiskinan menjadi berkurang (Adi Widodo, 2011).

Inflasi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian. Inflasi yang terlalu tinggi akan mengganggu kestabilan perekonomian dan akan menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. Inflasi merupakan salah satu faktor yang dianggap menyebabkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dapat meningkat. Dapat dikatakan demikian karena jika inflasi naik harga barang - barang umum akan merangsek naik, hal tersebut membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari - harinya. Dan jika hal tersebut terjadi akan membuat masyarakat jauh dari kata sejahtera.

Inflasi dapat mengurangi pendapatan riil terutama untuk kelompok pendapatan tetap. Selama dalam keadaan inflasi, orang-orang dalam kelompok

berpendapatan tetap akan kalah, karena harga beberapa barang dan jasa naik lebih cepat dari upah nominal. Kelas - kelas miskin menderita karena upah mereka tetap tetapi harga komoditas terus naik (Oye, 2012).

Tabel 1.6
Inflasi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota 2011 - 2016

Tahun	Inflasi
2011	2.68
2012	4.24
2013	7.99
2014	8.22
2015	2.73
2016	2.36

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.6 inflasi terendah Jawa Tengah terjadi pada tahun 2016 sebesar 2.36 persen, sedangkan laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8.22 persen. Hal tersebut merupakan masalah cukup serius yang harus dihadapi Provinsi Jawa Tengah karena tidak dapat menjaga kestabilan dalam sisi moneter. Laju inflasi Jawa Tengah masih tergolong ringan karena masih dibawah angka 10 persen. Kenaikan harga – harga barang tidak dirasakan oleh masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat tidak akan terpengaruh tetap mampu membeli barang – barang kebutuhan dan tingkat kemiskinan dapat turun.

Terkendalnya nilai inflasi tidak terlepas dari peran Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi, memperbaiki

distribusi serta meminimalkan distorsi (penyimpangan) berbagai harga terutama harga pangan.

Bukan hanya faktor pertumbuhan ekonomi, ipm, dan inflasi saja yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Didalam teori Lewis dijelaskan bahwa tujuan dari proses pembangunan khusus ditujukan bagi negara yang menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja. Lewis menganggap di negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebih, tetapi memiliki masalah kekurangan modal dan keluasan tanah yang terbatas (Sukirno, 2006).

Pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Baik negara berkembang maupun negara maju, pengangguran merupakan suatu keadaan yang keberadaannya tidak terelakkan. Pengangguran memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan sebab pengangguran sangat berpengaruh terhadap terjadinya masalah kerawanan berbagai tindak kriminal, gejolak sosial, politik dan kemiskinan (Amalia, 2012)

Tabel 1.7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah 2011 - 2016

Tahun	TPT
2011	5,93
2012	5,61
2013	6,01
2014	5,68
2015	4,99
2016	4,63

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (Sekernas Agustus)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah selalu mengalami penurunan dan sekali mengalami kenaikan selama enam tahun terakhir. Pada 2016, TPT Jateng sebesar 4,63, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,99. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat 4 hingga 5 orang yang menganggur. Semakin kecil nilai TPT menunjukkan indikasi penyerapan tenaga kerja yang semakin baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:.

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
2. Bagaimana pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

4. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

1.3 Batasan Masalah

Agar lebih fokus dan mendalami penelitian maka penulis mempersempit cakupan pembahasan dalam penelitian ini. Cakupan pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan pertumbuhan Ekonomi, IPM, inflasi dan pengangguran yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun (2011 - 2016).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

4. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian:

1. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru serta menambah informasi mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi kemiskinan.
2. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut masalah kemiskinan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini peneliti mencoba menggali informasi dari beberapa jurnal penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah” untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Pertama adalah penelitian dengan judul “Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001 – 2010 yang dilakukan Amalia (2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia bagian Timur periode 2001-2010. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan data yang digunakan adalah data panel, menggunakan data dari tiga propinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia. Ketiga propinsi tersebut antara lain: Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Papua. Variabel yang digunakan yaitu jumlah penduduk miskin, pendidikan, pengangguran, inflasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengangguran tidak

berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Timur Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena tingkat pendapatan keluarga yang tinggi sehingga mampu menopang biaya hidup bagi keluarga yang masih menganggur. Inflasi berpengaruh negatif bagi tingkat kemiskinan di kawasan Timur Indonesia. Hal ini dapat dapat terjadi karena inflasi sebagai determinan makro bagi perubahan kondisi kemiskinan di suatu negara. Pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Timur Indonesia. Pendidikan merupakan investasi yang imbalannya dapat diperoleh beberapa tahun kemudian dalam bentuk penambahan hasil kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas.

Penelitian yang dilakukan Sebayang (2013) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemiskinan yang terjadi di Propinsi Jawa Tengah dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran, dan belanja publik terhadap kemiskinan. Analisis data menggunakan teknik Ordinary Least Square (OLS). Hasil dari penelitian initingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan fakta bahwa jumlah orang miskin didaerah lebih besar dari pada kota. Secara statistik, PDRB dan variabel lainnya seperti pengeluaran publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran pengaruhnya tidak signifikan.

Puspita (2015) melakukan analisis tentang “Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kemiskinan di provinsi Jawa Tengah periode 2008 sampai 2012. Dipilihnya

JawaTengah sebagai objek penelitian karena dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan penduduk miskin terbanyak ke dua. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan diantaranya yaitu jumlah penduduk miskin, banyaknya pengangguran, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Angka Melek Huruf. Dari semua variabel tadi dipilih periode 2008 sampai 2012. Metode penelitian yang digunakanyaitu metode regresi data panel. Hasil dari penelitian ini pengangguran, PDRB dan jumlah atau populasi penduduk Jawa Tengah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.

Penelitian yang dilakukan Zuhdiyaty (2017) dalam jurnal “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus pada 33 Provinsi). Maksud dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia selama kurun waktu lima tahunan 2011 – 2015. Penelitian ini dilakukan pada 33 provinsi yang ada di Indonesia dan menggunakanpendekatan kuantitatif dengan uji regresi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara IPM dengan kemiskinan, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi dan TPT tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Selain dari beberapa penelitian diatas ada beberapa penelitian lain yang diambil oleh peneliti dalam sajian tabel berikut:

Tabel 2.1 Kajian Pustaka

NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL INDEPENDEN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
(Amalia, 2012)	Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001 – 2010	Pendidikan (X1) Pengangguran (X2) Inflasi (X3)	Analisis data panel	Pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Inflasi berpengaruh negatif bagi tingkat kemiskinan Pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.
(Arianti, 2012)	Analisis Pengaruh Pdrb, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004 – 2009	PDRB (X1) Pengangguran (X2) Pendidikan (X3) Kesehatan (X4)	Model regresi data panel dengan menggunakan model fixed effects, dengan memasukkan dummy.	PDB, pendidikan, kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.
(Nurmainah, 2013)	Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah ,Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Studi kasus 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah)	Belanja modal pemerintah (X1) Penyerapan tenaga kerja (X2) Indeks Pembangunan Manusia (X3)	Data panel yang menggabungkan data time series dan cross section. Data ini dianalisis dengan menggunakan Structural Equation Modeling dengan AMOS 20.	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.
(Mahsunah, 2013)	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur	Jumlah penduduk (X1) Pendidikan (X2) Pengangguran (X3)	Metode analisis regresi berganda.	Jumlah penduduk dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan. Dengan uji F

				ketiga variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi kemiskinan.
(Wiguna, 2013)	Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2010	Produk Domestik Regional Bruto (X1) Tingkat pendidikan (X2) Tingkat pengangguran (X3)	Data panel regresi linier berganda.	PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah..
(Sebayang, 2013)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.	Produk Domestik Regional Bruto(PDRB), (X1) Pengangguran (X2) Belanja publik (X3)	Teknik Ordinary Least Square (OLS).	Penurunan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara statistik ,PDRB dan variabel lainnya seperti pengeluaran publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran pengaruhnya tidak signifikan.
(Puspita, 2015)	Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah	Jumlah penduduk miskin, Banyaknya pengangguran (X1) Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) (X2) Angka Melek Huruf (X3).	Metode regresi data panel.	Pengaruh pengangguran, PDRB dan jumlah atau populasi penduduk Jawa Tengah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.

(Dewi, 2016)	Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali	Inflasi (X1) Tingkat Pendidikan (X2) Investasi (X3)	Path analysis	Inflasi berpengaruh menurunkan kemiskinan melalui pengangguran di Provinsi Bali. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pengangguran di Provinsi Bali. Investasi berpengaruh meningkatkan kemiskinan melalui pengangguran di Provinsi Bali.
(Susanto, 2015)	Impact Of Economic Growth, Inflation And Minimum Wage On Poverty In Java	Pertumbuhan Ekonomi (X1) Inflasi (X2) Upah Minimum (X3)	Regresi data panel dinamis berdasarkan Error Correction Model (ECM)	Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak negatif pada tingkat kemiskinan, inflasi berdampak positif terhadap tingkat kemiskinan. Upah minimum tidak berdampak pada tingkat kemiskinan.
(Wulandari, 2015)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2012	Pertumbuhan Ekonomi (X1) Inflasi (X2) Pengangguran (X3) Pendidikan (X4)	Regresi data panel dengan random effect model	Pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi kemiskinan. Inflasi yang terjadi mempengaruhi kemiskinan. Terdapat kesesuaian hukum Okun di Indonesia bahwa pada saat pengangguran turun maka kemiskinan akan turun dan sebaliknya. Faktor pendidikan tidak dapat mempengaruhi kemiskinan.

(Inggit, 2016)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2004 - 2014	Pertumbuhan Ekonomi (X1) Pertumbuhan Penduduk (X2) Inflasi (X3)	Analisis regresi linier berganda	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
(Sindi Paramita Sari, 2016)	Analisis Pdrb, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2013	PDRB (X1) Tingkat Pendidikan (X2) Pengangguran (X3)	Kuantitatif metode deskriptif dengan pendekatan regresi berganda.	PDRB, pendidikan, dan pengangguran secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. PDRB dan pendidikan berpengaruh negatif. Sedangkan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan.
(Duwila, 2016)	Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia (Kti)	Pendidikan (X1) Pengangguran (X2) Inflasi (X3)	Data panel	Pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Pendidikan dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Apabila dilihat dari hasil uji F statistik, seluruh variabel independen (pendidikan, pengangguran dan inflasi) secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia pada taraf keyakinan 95%.

(Dewi N. K., 2016)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali	Inflasi (X1) Tingkat Pendidikan (X2) Investasi (X3) Pengangguran (X4)	Path analysis	Inflasi berpengaruh menurunkan kemiskinan melalui pengangguran. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pengangguran. Investasi berpengaruh meningkatkan kemiskinan melalui pengangguran.
Noor Zuhdiyaty, 2017	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus pada 33 Provinsi).	IPM (X1) Pertumbuhan ekonomi (X2) Tingkat Pengangguran Terbuka (X3)	Pendekatan kuantitatif dengan uji regresi	Adanya pengaruh antara IPM dengan kemiskinan, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi dan TPT tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.
(Suryowati, 2018)	Aplikasi Metode Common Effect, Fixed Effect, Random Effect Untuk Menganalisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Rata – Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah Laju Pertumbuhan Ekonomi Angka Harapan Hidup	Analisis regresi data panel. Memilih model terbaik common effect, fixed effect, random effect dengan metode estimasi Generalized Least Square (GLS)	Model terbaik untuk Jawa Tengah adalah fixed effect sedangkan DI Yogyakarta model Random Effect.

2.2 LANDASAN TEORI

2.2.1 Kemiskinan

2.2.1.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup (proper). Dalam arti luas, Chambers mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu kemiskinan (proper), ketidakberdayaan (powerless), kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), ketergantungan (dependence) dan keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis (Suryawati, 2005).

Menurut Mubyarto (2004) kemiskinan dijelaskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok atau kebutuhan hidup minimum yaitu sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

2.2.1.2 Penyebab Kemiskinan

Salah satu penyebab kemiskinan menurut (World Bank) adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (acceptable). Selain itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2004), diantaranya adalah tingkat dan laju pertumbuhan output, tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, tingkat inflasi, pajak dan subsidi. Selain itu ada faktor dari investasi, alokasi serta kualitas sumber daya alam. Ketersediaan fasilitas umum, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan juga menjadi faktor penyebab kemiskinan. Dan terakhir kondisi alam, politik dalam negeri, bencana alam, dan peperangan.

2.2.1.3 Ukuran Kemiskinan

Secara sederhana dan umum ukuran kemiskinan menurut Mudrajad (1997) dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, kemiskinan yang menggambarkan kondisi seseorang yang memiliki penghasilan dibawah garis kemiskinan atau tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan, sandang, papan serta kebutuhan kesehatan dan pendidikan menunjang kehidupannya.
- b. Kemiskinan relatif, suatu keadaan kemiskinan yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada sisi pendapatan.
- c. Kemiskinan kultural, kemiskinan yang pada umumnya diakibatkan oleh mental atau nilai nilai yang dianut seseorang, tidak mau berusaha untuk memperbaiki taraf hidup (malas), tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

World Bank menetapkan ukuran standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk dengan pendapatan per kapita kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD \$2 per orang per hari.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2.100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Ketentuan yang menjadi dasar kecukupan 2.100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan.

2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.2.2.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Prof. Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai macam jenis barang - barang ekonomi dalam jumlah yang banyak kepada penduduknya. Adanya kemajuan atau penyesuaian - penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada menentukan kenaikan kapasitas itu sendiri (Boediono, 1999).

Hal tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi dicirikan dengan 3 hal pokok, antara lain:

1. Laju pertumbuhan perkapita dalam arti nyata (riil).
2. Distribusi atau persebaran angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber penghasilannya.
3. Pola persebaran penduduk.

gunakan.

2.2.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori trickle-down effect yang dikembangkan pertama kali oleh Arthur Lewis (1954) dan diperluas oleh Ranis dan Fei (1968). Didalam teori jelaskan bahwa kemakmuran yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata.

Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi dengan sendirinya diawali oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya peningkatan kemiskinan sebagai akibat dari meningkatnya ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih memihak penduduk kaya dibanding penduduk miskin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan apabila pertumbuhan ekonomi yang terjadi berpihak pada penduduk miskin.

2.2.2.3 Alat Ukur Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Wiguna (2013) dalam suatu proses pertumbuhan ekonomi, salah satu indikator yang digunakan untuk melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara atau wilayah adalah menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui PDRB, dapat terlihat kegiatan ekonomi yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh suatu negara atau daerah selama periode tertentu.

Produk Domestik Bruto (PDB), atau di tingkat regional disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari seluruh kegiatan di suatu daerah dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

Rumus perhitungan produk domestik bruto per kapita baik di tingkat nasional maupun regional daerah adalah jumlah PDB nasional atau PRDB daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara maupun daerah yang bersangkutan.

Bank Dunia menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB), bukan PDB sebagai alat ukur perkembangan ekonomi suatu negara. yaitu dengan memperhitungkan pendapatan bersih dan faktor produksi milik orang asing.

Menurut Tarigan (2004) angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu melalui pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan juga pendekatan pengeluaran yang sebagai berikut dapat dijelaskan :

1. Pendekatan Produksi

PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari berbagai hasil unit produksi yang berbeda disuatu wilayah/provinsi dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha diantaranya adalah pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan yang terakhir jasa-jasa.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Balas jasad faktor produksi tersebut diantaranya adalah upah dan gaji,

sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

3. Pendekatan Pengeluaran, PDRB merupakan penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu :
 - a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
 - b. Konsumsi pemerintah.
 - c. Pembentukan modal tetap domestik bruto.
 - d. Perubahan stok.
 - e. Ekspor netto.

Didalam perhitungan nilai PDRB dapat dilakukan dengan dua macam dasar harga, yaitu :

1. PDRB atas dasar harga konstan yaitu PDRB yang dihitung dengan dasar harga yang berlaku pada tahun tersebut. PDRB atas dasar harga konstan berfungsi dalam melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.
2. PDRB atas dasar harga berlaku yaitu PDRB yang dihitung dengan dasar harga berlaku pada tahun tersebut. PDRB atas dasar harga yang berlaku digunakan untuk melihat perkembangan struktur ekonomi yang riil pada tahun tersebut.

2.2.2.4 Hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan

Teori trickle-down effect Arthur Lewis (1954) dijelaskan bahwa kemakmuran yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pada penelitian yang dilakukan Wahyuniarti (2008) dijelaskan didalamnya bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai indikator yang sangat penting untuk melihat keberhasilan pembangunan di suatu negara maupun daerah sebagai syarat untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Syarat keberhasilan pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menyebar disetiap golongan masyarakat, tidak hanya menyebar di golongan penduduk kaya tetapi juga menyebar di golongan penduduk miskin.

2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

2.2.3.1 Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 1990 UNDP pertama kali memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Indeks Pembangunan Manusia dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dijalankan

pemerintah pada tahun sebelumnya. IPM mengukur dan menunjukkan kemajuan program pembangunan di awal dan akhir dalam suatu periode tersebut.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

2.2.3.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Dari uraian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diatas dapat disimpulkan bahwa komponen – komponen yang mempengaruhi IPM antara lain: umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir, pengetahuan diukur berdasarkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah sedangkan standar hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas kemampuan daya beli masyarakat (purchasing power parity) terhadap sejumlah kebutuhan pokok sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak

2.2.3.3 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Didalam teori pertumbuhan baru dijelaskan pentingnya peranan dari pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital), mendorong berbagai penelitian, dan pengembangan untuk meningkatkan

produktivitas manusia. Hal ini dapat terlihat dari investasi pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibuktikan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keterampilan mendorong peningkatan produktivitas orang tersebut. Perusahaan akan memperoleh imbal balik dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja sehingga produktivitas yang dihasilkan tinggi dan perusahaan tidak berkeberatan memberikan gaji yang lebih tinggi bagi para pekerjanya.

Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian akan mampu meningkatkan hasil produktivitas pertanian, karena dengan tenaga kerja yang terampil maka akan dapat bekerja secara efisien. Seseorang yang memiliki keahlian produktivitas yang tinggi kesejahteraannya akan meningkat. Hal ini bisa dibuktikan dari peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan sebagainya (Sinaga, 2009).

2.2.4 Inflasi

2.2.4.1 Definisi Inflasi

Menurut Sukirno (2004) inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga - harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari satu

periode ke periode yang lain. Dan tingkat inflasi berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Dimana tingkatan inflasi itu dibagi menjadi tiga, pertama tingkat inflasi rendah yaitu dibawah 2 atau 3 persen. Kedua, tingkat inflasi moderat jika kenaikan harga dapat mencapai 4 sampai 10 persen, dan ketiga adalah tingkat inflasi yang serius, tingkat inflasi serius terjadi jika kenaikan mencapai tingkat puluhan atau ratusan persen dalam setahun.

2.2.4.2 Jenis – Jenis Inflasi

Inflasi menurut tingkat keparahannya dalam Karim (2007), inflasi dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Moderate Inflation

Suatu keadaan inflasi yang ditandai dengan harga – harga yang meningkat secara lambat. Inflasi ini dapat juga disebut dengan inflasi ‘satu digit per tahun’. Masyarakat bersedia memegang uang karena nilai mata uang hampir sama dengan nilai mata uang pada bulan atau tahun yang akan datang. Mereka meyakini bahwa tingkat harga – harga barang yang mereka beli atau jual tidak akan bergerak terlalu jauh. Mereka lebih memilih menyimpan kekayaan dalam bentuk aktiva riil ketimbang aktiva uang, karena mereka mempercayai aktiva uang akan tetap sama nilainya.

2. Galloping Inflation

Inflasi yang disebut juga dengan ‘inflasi dua digit’. Inflasi yang ditandai dengan naiknya harga – harga barang secara cepat dan relatif besar. Persentase inflasi ini

berada di kisaran 20% sampai dengan 200% per tahun. Dalam situasi seperti ini uang akan kehilangan nilainya dengan sangat cepat. Sebagai konsekuensinya masyarakat akan lebih cenderung menyimpan kekayaannya dalam bentuk aset riil dan hanya mau memegang sejumlah uang yang diperlukan saja. Pasar uang menjadi tidak bergairah dan dana – dana umum dialokasikan berdasarkan rasio ketimbang tingkat bunga.

3. Hyper Inflation

Suatu keadaan inflasi yang ditandai dengan naiknya harga secara drastis hingga mencapai empat digit. Tingkat inflasi ini berada di kisaran jutaan hingga trilyunan persen per tahun. Masyarakat enggan menyimpang uang karena nilai mata uang akan merosot tajam.

2.2.4.3 Dampak Inflasi

Dampak inflasi terhadap individu maupun masyarakat menurut Manurung (2006) diantaranya adalah :

1. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat: inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap.
2. Memperburuk distribusi pendapatan: bagi masyarakat dengan pendapatan tetap akan mengalami kemerosotan nilai riil dari pendapatannya dan

pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Justru bagi pemilik kekayaan tetap seperti tanah atau bangunan mereka dapat mempertahankan atau menambah nilai riil kekayaannya. Sehingga inflasi akan membuat ketimpangan pendapatan antara kelompok berpendapatan tetap dengan para pemilik kekayaan tetap.

2.2.4.4 Teori – Teori Inflasi

Secara garis besar teori yang membahas tentang inflasi dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Masing – masing kelompok menyoroti aspek - aspek tertentu dari proses terjadinya inflasi. Ketiga teori tersebut adalah Teori Kuantitas, Teori Keynes, dan Teori Strukturalis.

1. Teori Kuantitas

Teori tertua yaang membahas inflasi ini pada prinsipnya mengatakan bahwa timbulnya inflasi itu hanya disebabkan oleh bertambahnya jumlah uang yang beredar dan bukan disebabkan oleh faktor-faktor lain. Berdasarkan teori ini ada dua faktor yang menyebabkan inflasi:

a) Jumlah uang yang beredar

Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun giral. Semakin besar jumlah uang yang beredar dalam masyarakat maka inflasi juga akan meningkat. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah harus memperhitungkan atau memperkirakan akan timbulnya inflasi yang bakal terjadi bila ingin mengadakan penambahan pencetakan uang baru,

karena pencetakan uang baru yang terlalu besar akan mengakibatkan goncangnya perekonomian.

b) Perkiraan/anggapan masyarakat bahwa harga-harga akan naik

Laju inflasi juga ditentukan oleh psikologi harapan (ekspektasi) dari masyarakat tentang kenaikan harga di masa mendatang. Jika masyarakat beranggapan harga-harga akan naik maka tidak ada kecenderungan untuk menyimpan uang tunai lagi, masyarakat akan menyimpan uang mereka dalam bentuk barang sehingga permintaan akan mengalami peningkatan. Hal ini mendorong naiknya harga secara terus-menerus.

2. Teori Keynes

Teori Keynes mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat memiliki permintaan melebihi jumlah uang yang tersedia. Proses perebutan rezeki antargolongan masyarakat masih menimbulkan permintaan agregat (keseluruhan) yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia, mengakibatkan harga secara umum naik. Jika proses tersebut terus terjadi maka selama itu pula proses inflasi akan berlangsung.

3. Teori Strukturalis

Teori Strukturalis merupakan teori yang menjelaskan fenomena inflasi jangka panjang. Hal ini didasarkan pada penjelasannya menyoroti sebab inflasi yang berasal dari struktur ekonomi, khususnya supply bahan makanan dan barang ekspor terutama yang terjadi di negara berkembang. Ada dua penyebab

infleksibilitas (kekakuan) utama dalam perekonomian negara sedang berkembang yang dapat menimbulkan inflasi. Infleksibilitas suplai bahan makanan dan barang-barang ekspor. Karena sebab-sebab struktural, perubahan atau penambahan produksi barang-barang ini terlalu lambat dibanding dengan pertumbuhan kebutuhannya, sehingga menaikkan harga bahan makanan dan kelangkaan devisa. Akibat dari penyebab diatas terjadi kenaikan harga-harga barang lain, sehingga terjadi inflasi. Inflasi seperti ini tidak bisa diatasi hanya dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, tetapi harus diatasi dengan pembangunan sektor bahan makanan dan ekspornya.

2.2.4.5 Hubungan Inflasi Terhadap Kemiskinan

Inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga yang berlaku secara umum dan terus menerus, atau bisa juga disebut gejala ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Teori Keynes mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat memiliki permintaan melebihi jumlah uang yang tersedia. Proses perebutan pendapatan antargolongan masyarakat masih menimbulkan permintaan agregat (keseluruhan) yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia, mengakibatkan harga secara umum naik.

Dalam jangka pendek kenaikan inflasi menyebabkan pertumbuhan perekonomian, namun dalam jangka panjang tingkat inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak yang buruk. Tingginya tingkat inflasi akan menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibanding dengan harga barang impor.

Masyarakat terdorong untuk membeli barang impor yang lebih murah dibandingkan barang domestik. Harga yang lebih mahal menyebabkan turunnya daya saing produk domestik menyebabkan barang impor naik. Kurang bersaingnya barang domestik menyebabkan rendahnya permintaan terhadap produk dalam negeri. Sejumlah perusahaan akan mengurangi produksi. Produksi berkurang berimbas kepada pengurangan pekerja kehilangan pekerjaannya.

2.2.5 Pengangguran

2.2.5.1 Definisi Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

2.2.5.2 Jenis – Jenis Pengangguran

Menurut Sukirno (2000) pengangguran dibedakan menjadi empat jenis berdasarkan penyebabnya antara lain:

a. Pengangguran Alamiah

Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh (full employment) adalah keadaan dimana seseorang sekitar 95 persen dari angkatan kerja mampu dan bersedia dalam suatu waktu

sepenuhnya untuk bekerja. Pengangguran sebanyak 5 dari 95 persen inilah yang dinamakan sebagai pengangguran alamiah.

b. Pengangguran Friksional

Suatu jenis pengangguran yang sifatnya sementara disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi antara pencari kerja dengan penerima lowongan pekerjaan. Mereka yang menganggur bukan karena tidak memperoleh pekerjaan tetapi tindakan seorang pekerja meninggalkan pekerjaannya demi mencari pekerjaan yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya.

c. Pengangguran Struktural

Pengangguran yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi. Tiga sumber utama yang menjadi penyebab berlakunya pengangguran struktural adalah perkembangan teknologi, kemunduran yang disebabkan oleh adanya persaingan dari luar negeri atau daerah lain, dan kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan yang pesat dikawasan lain.

d. Pengangguran Konjungtur

Pengangguran yang melebihi pengangguran alamiah. Pengangguran ini disebabkan oleh perubahan gelombang (naik turunnya) kehidupan perekonomian. Pada saat perekonomian mengalami masalah resesi (kemunduran) dan masa depresi (kehancuran) yang berakibat pada pengurangan dalam permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar, sehingga muncul pengangguran konjungtur.

Jenis-Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya:

a) Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

b) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini terjadi karena kelebihan tenaga kerja dalam satu unit yang diperlukan. Padahal dengan mengurangi tenaga kerja sampai jumlah tertentu tidak akan mengurangi jumlah produksi. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian atau jasa.

c) Pengangguran Musiman

Keadaan pengangguran yang terjadi pada masa-masa tertentu dalam satu tahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian. Petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan kembali bekerja saat musim tanam atau musim panen.

d) Setengah Menganggur

Keadaan dimana seseorang tidak bekerja secara optimal dibawah jam kerja normal karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Indonesia, jam kerja normal untuk karyawan adalah 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam seminggu. Sedangkan untuk karyawan dengan 5 hari kerja dalam seminggu kewajiban kerja mereka 8 jam dalam sehari dan 40 jam dalam seminggu.

2.2.5.3 Hubungan Pengangguran Terhadap Kemiskinan

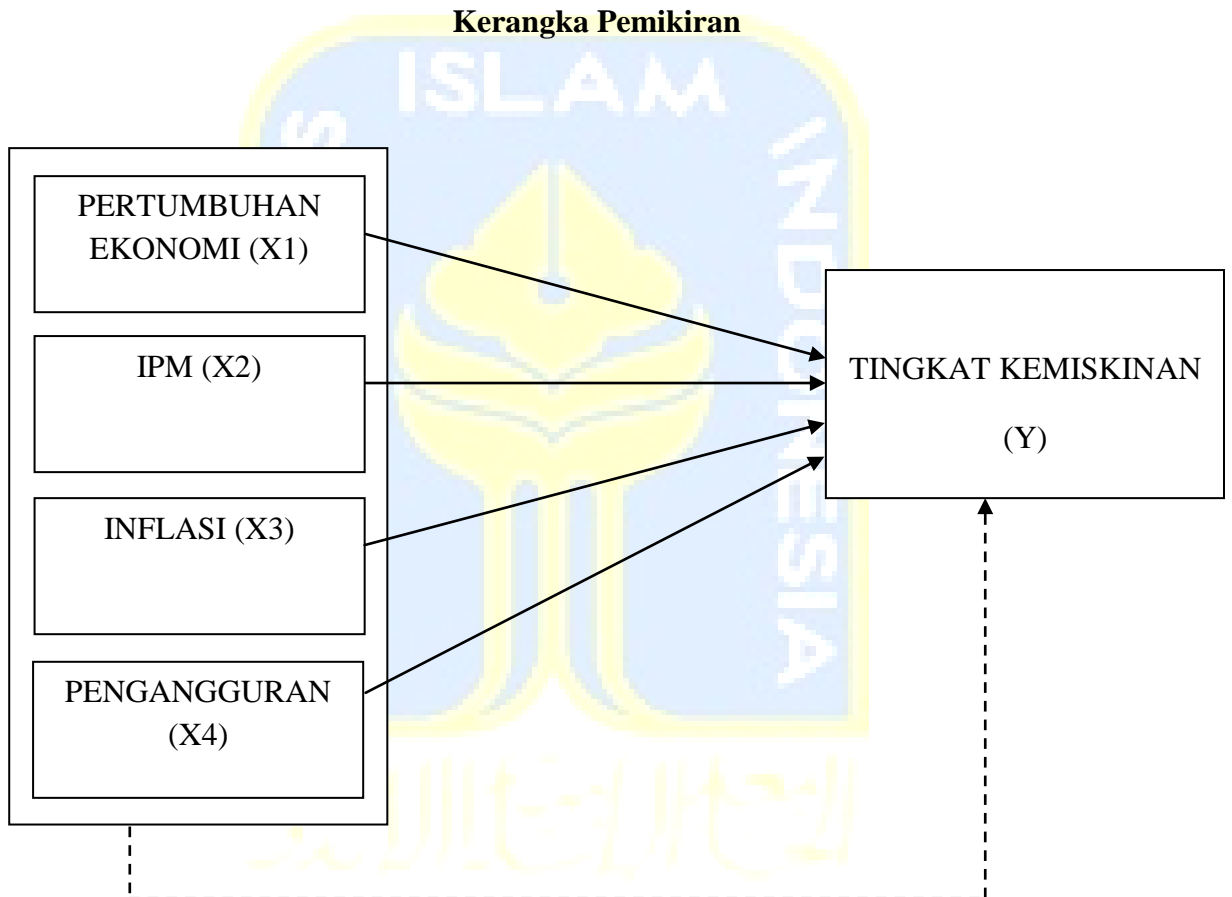
Pengaruh buruk dari pengangguran terhadap kemiskinan menurut Sukirno, (2004) adalah pendapatan masyarakat berkurang karena tidak memiliki pekerjaan yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Kesejahteraan masyarakat semakin menurun karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Bila pengangguran yang terjadi di suatu negara sangat buruk, hal ini dapat berdampak pada kekacauan politik, sosial, menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar kerangka pemikiran yang skematis:

Gambar 2.1

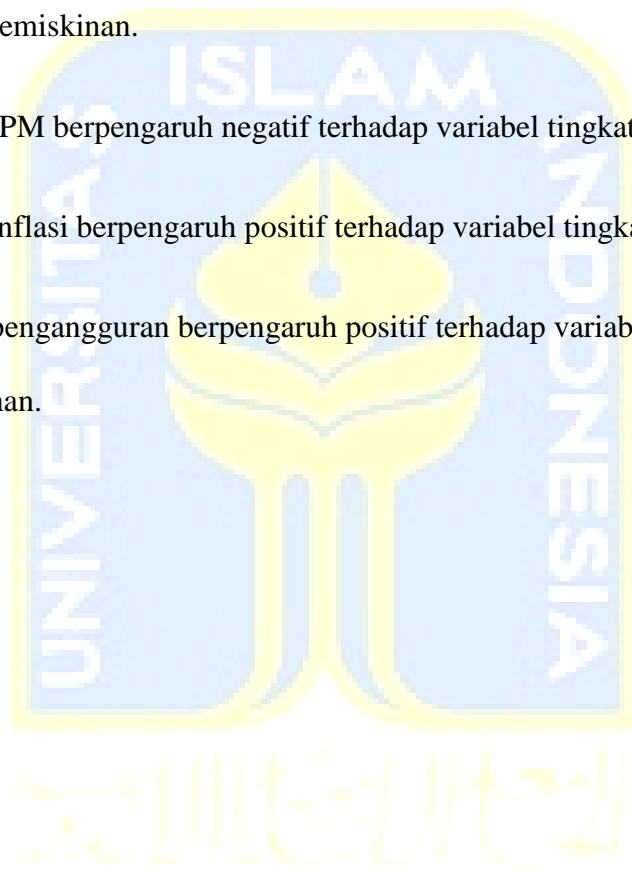
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Dari landasan teori dan beberapa kajian pustaka diatas, dan setelah mengamati hubungan antar variabel dependen dengan indenpendennya maka terdapat beberapa hipotesis yang mendasari penelitian diantaranya:

1. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan.
2. Diduga IPM berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan.
3. Diduga inflasi berpengaruh positif terhadap variabel tingkat kemiskinan.
4. Diduga pengangguran berpengaruh positif terhadap variabel tingkat kemiskinan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Didalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan data cross section dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan times series dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 atau lebih sering disebut dengan data panel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang berupa Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi, dan Pengangguran memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain dengan variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel digunakan untuk memudahkan dalam memahami variabel-variabel yang digunakan. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.2.1 Variabel Dependen

Tingkat Kemiskinan (TK)

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana adanya ketidak mampuan seseorang ataupun kelompok didalam memenuhi standar minimum kebutuhan hidupnya yang meliputi makan ataupun non makan. sehingga kesejahteraan yang tercapai didalam seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi berkurang dan tidak tercapai. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data persentase kemiskinan menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2011 – 2016 (dalam satuan persen). Data diambil dari BPS

3.2.2 Variabel Independen

a. Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah di Indonesia dapat diukur melalui peningkatan atau penurunan PDRB per kapita yang dihasilkan suatu daerah, karena indikator yang berhubungan dengan jumlah pengangguran. Produk domestik bruto per kapita atau produk domestik regional bruto per kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Produk domestik bruto per kapita baik di tingkat nasional maupun di daerah dihitung dari jumlah PDB atau PRDB dibagi dengan jumlah penduduk di negara maupun di daerah yang bersangkutan.

Rumus penghitungan PDRB Per Kapita:

$$G = \frac{PDRB1 - PDRB0}{PDRB0} \times 100\%$$

Keterangan :

G = Pertumbuhan Ekonomi

PDRB1 = PDRB ADHK tahun ini

PDRB0 = PDRB ADHK tahun sebelumnya

Data yang digunakan adalah data laju PDRB atas dasar harga konstan untuk masing – masing kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2011 – 2016. Data diambil dari BPS.

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur representatif dan melihat upaya kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Indeks pembangunan manusia dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan pemerintah pada tahun sebelumnya. IPM juga mengukur dan menunjukkan kemajuan program pembangunan di awal dan akhir dalam suatu periode tersebut. IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Terdapat tiga komponen yang dianggap penting dan mendasar bagi manusia karena secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Cakupan ketiga komponen tersebut adalah umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat

dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir, pengetahuan diukur berdasarkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah sedangkan standar hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita diseuaikan.

Rumus Penghitungan IPM diambil dari BPS dengan metode baru =

$$\text{Dimensi Kesehatan (IKesehatan)} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

$$\text{Dimensi Pendidikan (IPengetahuan)} = \frac{IHLS + IRL}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{Dimensi Pengeluaran (IPengeluaran)} \\ = \frac{\ln(\text{pendapatan}) - \ln(\text{pendapatan}_{min})}{\ln(\text{pendapatan}_{maks}) - \ln(\text{pendapatan}_{min})} \end{aligned}$$

$$IPM = \sqrt[3]{IKesehatan \times IPendidikan \times IPengeluaran}$$

Keterangan:

AHH = Angka Harapan Hidup

IHLS = Indeks Harapan Lama Sekolah

RLS = Indeks Rata – Rata Lama Sekolah

ln = Indeks pendapatan

Data yang digunakan adalah data indeks pembangunan manusia untuk masing – masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2011 -2016. Data diambil dari BPS.

c. Inflasi (INF)

Inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode lainnya.

Dan tingkat inflasi berbeda antara negara satu dengan negara yang lainnya. Dimana tingkat inflasi itu dibagi tiga, tingkat inflasi rendah yaitu mencapai dibawah 2 atau 3 persen. Tingkat inflasi moderat mencapai diantara 4 sampai 10 persen sedangkan tingkat inflasi yang serius dapat mencapai beberapa puluh atau beberapa ratus persen dalam setahun (Sadono Sukirno, 2014).

Rumus penghitungan Inflasi:

$$\text{Inflasi} = \frac{IHK_n - IHK_{n1}}{IHK_{n1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IHK_n = Indeks Harga Konsumen tahun dasar

IHK_{n1} = Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya

Data yang digunakan adalah data inflasi Jawa Tengah menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2011 – 2016. Data diambil dari BPS.

d. Pengangguran (PG)

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

Rumus penghitungan pengangguran terbuka:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Ket: TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.

Data yang digunakan adalah data pengangguran terbuka untuk masing – masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2011 – 2016. Data diambil dari BPS.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana sumber datanya dikumpulkan melalui berbagai perantara baik dari buku-buku, jurnal terdahulu maupun dari bukti yang telah ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai sumber yang di cari melalui Badan Pusat Statistik (BPS) serta dari buku-buku, jurnal terdahulu, dan website yang dapat mendukung jalannya penelitian ini dengan baik.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis data panel sebagai alat pengolahan data yang menggunakan *Eviews9*. Metode analisis panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time series*) dengan analisis deret hitung (*cross section*), (Widarjono, 2013). Terdapat bentuk regresi untuk data panel didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$TK = \beta_0 + \beta_1 PE + \beta_2 IPM + \beta_3 INF + \beta_4 PG + \mu$$

TK = Tingkat Kemiskinan (Satuan Persen)

PE = Pertumbuhan Ekonomi (Satuan Persen)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

INF =Tingkat Inflasi (Satuan Persen)

PG = Pengangguran (Satuan persen)

B₀ = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = Koefisien regresi berganda

μ = Variabel pengganggu

Ada Beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan didalam menggunakan data panel. Menurut Widarjono (2013) keuntungan - keuntungan yang diperoleh diantaranya adalah data panel merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu untuk menyediakan data lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kemudian didalam menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* mampu untuk mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel.

3.5 Model Regresi Data Panel

Dalam estimasi model analisis regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu dengan menggunakan *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan yang terakhir menggunakan *Random Effect Model* (Widarjono, 2013).

1. Common Effect Model

Metode pendekatan *common effect* adalah pendekatan paling sederhana untuk mengestimasi data panel dimana hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dengan kita hanya menggabungkan data yang kita punya tanpa melihat perbedaan waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode OLS dalam mengestimasi model data panel. Dalam pendekatannya *common effect model* tidak memperhatikan dimensi antara individu maupun waktu sehingga diasumsikan bahwa perilaku data antara kabupaten sama dalam berbagai kurun waktu (Widarjono, 2013). Model *common effect* dapat dituliskan sebagai berikut ini :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it}$$

2. Fixed Effect Model

Didalam model *fixed effect* diasumsikan terdapat efek yang memiliki perbedaan antar individu. Oleh sebab itu, model *fixed effect* merupakan parameter yang tidak diketahui dan selanjutnya akan diestimasi dengan menggunakan teknik variabel dummy. Didalam model *fixed effect* kita menggunakan variabel dummy sebagai alat untuk mengestimasi data panel yang ingin kita teliti. Model estimasi tersebut adalah *Least Squares Dummy Variables (LSDV)* (Widarjono, 2013). Model *fixed effect* dengan menggunakan teknik variabel dummy dapat dituliskan sebagai berikut ini :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1i} + \beta_4 D_{2i} + \beta_5 D_{3i} + \dots + e_{it}$$

3. Random Effect Model

Didalam *fixed effect* model diketahui bahwa variabel dummy bertujuan untuk mewakili ketidak tahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun hal tersebut akan membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya *random effect model* atau bisa dikatakan dapat diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (*error terms*). Didalam model *random effect* ini kita akan mengestimasi data panel yang dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan baik antar waktu ataupun antar individu (Widarjono, 2013). Model *random effect* dapat dituliskan sebagai berikut ini :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

3.6 Menentukan Model Estimasi

Untuk pemilihan model yang akan digunakan dalam sebuah penelitian perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Hal ini dilakukan untuk memilih model yang tepat maka perlu adanya beberapa metode pengujian yang dapat dilakukan, yaitu :

3.6.1 Uji Chow (*Chow Test*)

Uji Chow adalah pengujian yang digunakan untuk menentukan model yang digunakan akan menggunakan model *common effect* atau model *fixed effect*.

Hipotesis yang digunakan dalam uji chow adalah :

H0 : Memilih model *common effect* atau pooled OLS jika nilai probabilitas F statistiknya tidak signifikan pada α 5%.

H1 : Memilih model *fixed effect* jika nilai probabilitas F statistiknya signifikan pada α 5%.

Dasar penolakan yang dilakukan pada hipotesis tersebut adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan tersebutlah yang nantinya digunakan apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak yang artinya model paling tepat digunakan adalah *fixed effect*. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka H0 diterima dan model paling tepat digunakan adalah *common effect*.

3.6.2 Uji Hausman (*Hausman Test*)

Uji hausman adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan. Uji hausman dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

H0 : Memilih model *random effect*, apabila nilai chi-squarenya tidak signifikan pada α 5%.

H1 : Memilih model *fixed effect*, apabila nilai chi-squarenya signifikan pada α 5%.

Statistik pada uji hausman mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan *degree off freedom* sebanyak K, dimana K adalah variabel independen. Jika saat kita menolak hipotesis nol dan statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya

maka model yang paling tepat untuk kita gunakan adalah model *fixed effect*, sedangkan apabila kita gagal dalam menolak hipotesis nol yaitu pada saat nilai statistik Hausmannnya lebih kecil dari nilai kritisnya maka model paling tepat yang harus kita pilih adalah model *random effect* (Widarjono, 2013).

3.6.3 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama - Sama (Uji F)

Uji F adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen keseluruhan secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan secara statistik didalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F kritis maka H_0 ditolak dan variabel-variabel independen tersebut secara keseluruhan akan berpengaruh terhadap variabel dependen (Widarjono, 2013).

3.6.4 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t adalah uji yang pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dimana dengan menganggap bahwa variabel bebas lainnya konstan. Hipotesis pengujian t-statistik adalah sebagai berikut :

H_0 : Secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

H_1 : Secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Apabila probabilitas nilai $t_{hitung} > 0.05$ maka H_0 diterima atau menolak H_1 , dan juga sebaliknya jika probabilitas $t_{hitung} < 0.05$ maka H_0 akan ditolak atau

menerima H1. Pada uji t tingkat signifikansi yang digunakan adalah pada angka 5% (Widarjono, 2013).

3.6.5 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model didalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai (R^2) adalah nol dan satu. Nilai (R^2) yang mendekati nol berarti kemampuan dari suatu variabel untuk menjelaskan variabel dependen sangat terbatas atau kecil. Sedangkan nilai suatu variabel yang mendekati satu maka variabel independen tersebut memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel dependen (Ghozali C. d., 2002).

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada analisis dan pembahasan penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, inflasi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Tengah dari tahun 2011 sampai dengan 2016. Dalam penelitian ini analisis dilakukan pada sejumlah data cross section dan time series yaitu sebanyak 35 sampel kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah pada periode tahun 2011 sampai dengan 2016. Analisis data panel dilakukan dengan melakukan pemilihan metode yang tepat dalam menganalisis data-data hasil penelitian, metode tersebut diantaranya Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect. Diantara ketiga metode analisis dipilih salah satu metode yang selanjutnya digunakan untuk tahap uji statistik. Dalam pengujian estimasi ini digunakan bantuan dengan program EVIEWS 9.

4.1 Analisis Deskriptif Statistik

Deskripsi statistik adalah untuk menggambarkan isi sebuah data secara lengkap seperti nilai rata - rata, nilai maximum/minimum, standar deviasi, dan sebagainya.

Tabel 4.1
Analisis Statistik Deskriptif

	TK	PE	IPM	INF	PG
Mean	13.77600	5.442238	69.02348	4.743143	5.709524
Median	13.51500	5.385000	68.20500	3.595000	5.430000
Maximum	24.21000	23.53000	81.19000	10.46000	11.98000
Minimum	4.850000	1.660000	59.66000	0.400000	1.350000
Std. Dev.	4.504289	1.469315	4.714844	2.472127	1.892213
Skewness	0.227329	8.708609	0.684686	0.545838	0.723613
Kurtosis	2.372511	111.0027	3.048724	1.763704	3.794759
Jarque-Bera	5.253995	104719.5	16.42858	23.80161	23.85341
Probability	0.072295	0.000000	0.000271	0.000007	0.000007
Sum	2892.960	1142.870	14494.93	996.0600	1199.000
Sum Sq. Dev.	4240.322	451.2072	4646.019	1277.285	748.3182
Observations	210	210	210	210	210

Sumber: Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v.9.

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh hasil deskripsi statistik sebagai berikut :

- 1) Tingkat Kemiskinan sebagai variabel dependen memiliki rata-rata sebesar 13,77 persen dengan std. deviation sebesar 4,50. Persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah terjadi di Kabupaten Wonosobo dengan persentase 24,21 persen pada tahun 2011. Sedangkan tingkat kemiskinan paling rendah terjadi di Kota Semarang dengan persentase kemiskinan 4,85 persen pada tahun 2016.
- 2) Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel independen memiliki rata-rata sebesar 5.44 persen dan std. deviation sebesar 1,46. PDRB paling tinggi terjadi di Kabupaten Blora dengan persentase 23,53 persen di tahun 2016. Sedangkan persentase PDRB paling rendah terjadi pada tahun 2013 di Kabupaten Cilacap dengan persentase 1,66 persen.

- 3) IPM sebagai variabel indenpenden memiliki rata – rata sebesar 69,02 dan std.deviation sebesar 4,71. IPM paling tinggi adalah Kota Semarang di tahun 2106 dengan IPM 81,19. Sedangkan IPM paling rendah adalah Kabupaten Pemalang pada tahun 2011 dengan IPM sebesar 59,66.
- 4) Inflasi sebagai variabel independen memiliki rata-rata sebesar 4.74 persen dan std. deviation sebesar 2,47. Tingkat inflasi paling tinggi terjadi di Kabupaten Kebumen pada tahun 2013 dengan tingkat inflasi sebesar 10,46 persen. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Tegal dengan tingkat inflasi sebesar 0,4 persen.
- 5) Pengangguran sebagai variabel independen memiliki rata-rata sebesar 5.70 persen dan std. deviation sebesar 1.89. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2012 di Kabupaten Pati dengan persentase 11,98 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terendah terjadi di Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 dengan persentase 1,35 persen.

4.2 Pengujian Kesesuaian Model

Hasil pengujian terhadap kesesuaian model menggunakan uji Chow dan uji Hausman.

4.2.1 Uji Chow (*Chow Test*)

Chow test yakni pengujian untuk menentukan model *Common Effect* atau *Fixed Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Hipotesis dalam uji chow adalah:

- a. H_0 : Ketika nilai P-value $> \alpha$ 5 persen atau berarti memiliki hasil tidak signifikan, maka model yang layak digunakan untuk estimasi yaitu *Common Effect Models*.
- b. H_a : Ketika nilai P-value $< \alpha$ 5 persen atau berarti memiliki hasil yang signifikan, maka model yang layak digunakan untuk estimasi yaitu *Fixxed Effect Models*.

Tabel 4.2
Hasil Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	270.818029	(34,171)	0.0000
Cross-section Chi-square	840.954435	34	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v.9.

Dari hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji chow diatas dapat diperoleh nilai probabilitas *chi-square*nya sebesar $0.000 < \alpha$ 5%, hal ini berarti menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a . Jadi, kesimpulan yang diperoleh adalah model *fixed effect* yang lebih tepat untuk digunakan dibandingkan dengan model *common effect*.

4.2.2 Uji Hausman (*Hausman Test*)

Uji Hausman dilakukan untuk menguji apakah data dianalisis dengan menggunakan *fixed effect* atau *random effect*. Hipotesis dalam uji Hausman adalah:

- a. H_0 : Ketika nilai P-value $> \alpha$ 5 persen atau berarti memiliki hasil tidak signifikan, maka model yang layak digunakan untuk estimasi yaitu *Random Effect Models*.
- b. H_a : Ketika nilai P-value $< \alpha$ 5 persen atau berarti memiliki hasil yang signifikan, maka model yang layak digunakan untuk estimasi yaitu *Fixxed Effect Models*.

Tabel 4.3
Hasil Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.996580	4	0.5584

Sumber: Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v.9.

Dari hasil pengujian menggunakan uji hausman dapat dilihat bahwa probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.5584 yang artinya lebih besar dari alfa 0,05% ($0.5584 > 0,05\%$). Maka H_0 diterima dan menolak H_a , sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil untuk estimasi terakhir model yang tepat untuk digunakan adalah model *Random Effect*.

4.3 Model Regresi Panel Random Effect

Tabel 4.4 Hasil Estimasi Random Effect Models

Dependent Variable: TK
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 03/03/18 Time: 13:34
 Sample: 2011 2016
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 210
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE	-0.006793	0.026626	-0.255105	0.7989
IPM	-0.761277	0.034573	-22.01938	0.0000
INF	-0.099935	0.014204	-7.035461	0.0000
PG	0.092779	0.032621	2.844138	0.0049
C	66.30324	2.557452	25.92551	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			3.471614	0.9801
Idiosyncratic random			0.494933	0.0199
Weighted Statistics				
R-squared	0.793390	Mean dependent var		0.800439
Adjusted R-squared	0.789359	S.D. dependent var		1.075746
S.E. of regression	0.493720	Sum squared resid		49.97077
F-statistic	196.8024	Durbin-Watson stat		1.032431
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.426453	Mean dependent var		13.77600
Sum squared resid	2432.022	Durbin-Watson stat		0.021213

Sumber: Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v.9.

Model regresi *Random Effect* pada tingkat kemiskinan di Provinsi

Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 PE + \beta_2 IPM + \beta_3 INF + \beta_4 PG + \mu$$

$$Y = 66.30324 - 0.0067939 - 0.761277 - 0.099935 + 0.092779 + \mu$$

Dimana:

Y_1 = Tingkat Kemiskinan (Satuan Persen)

PE = Pertumbuhan Ekonomi (Satuan Persen)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

INF = Inflasi (Satuan Persen)

PG = Pengangguran (Satuan persen)

B_0 = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = Koefisien regresi berganda

μ = Variabel pengganggu

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = 66.303 - 0.00679PE - 0.761IPM - 0.099INF + 0.0927PG$$

Artinya:

- Konstanta (Y_{it}) sebesar 66.303 memberikan pengertian jika seluruh variabel independen memiliki nilai sama dengan nol (0), maka tingginya tingkat kemiskinan sebesar 66.303 %.
- Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai sebesar - 0.00679 dengan tanda negatif. Artinya, setiap penambahan per satu - satuan

variabel Pertumbuhan Ekonomi maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0.00679 %.

- c. Koefisien regresi variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai sebesar -0.761 dengan tanda negatif. Artinya setiap penambahan per satu - satuan variabel Indeks Pembangunan Manusia maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0.761 %.
- d. Koefisien regresi variabel Inflasi memiliki nilai sebesar - 0.099 dengan tanda negatif. Artinya apabila setiap penambahan per satu - satuan variabel Inflasi maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0.099 %.
- e. Koefisien regresi variabel Pengangguran memiliki nilai sebesar 0.0927 dengan tanda positif. Artinya apabila setiap penambahan per satu - satuan variabel Pengangguran maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,0927 %.

Tabel 4.5 Intersep Random Effect**Kabupaten/Kota Jawa Tengah**

Kabupaten/Kota	Koefisien	Kabupaten/Kota	Koefisien
Kabupaten Cilacap	-0.38739	Kabupaten Kudus	-3.4657
Kabupaten Banyumas	4.679579	Kabupaten Jepara	-4.39102
Kabupaten Purbalingga	4.492972	Kabupaten Demak	1.496502
Kabupaten Banjarnegara	0.658837	Kabupaten Semarang	-3.03668
Kabupaten Kebumen	5.237271	Kabupaten Temanggung	-3.76389
Kabupaten Purworejo	2.304656	Kabupaten Kendal	-1.79506
Kabupaten Wonosobo	5.120741	Kabupaten Batang	-5.587
Kabupaten Magelang	-2.43507	Kabupaten Pekalongan	-2.30885
Kabupaten Boyolali	0.598396	Kabupaten Pemalang	-0.24333
Kabupaten Klaten	4.791585	Kabupaten Tegal	-7.44082
Kabupaten Sukoharjo	-0.46046	Kabupaten Brebes	1.418464
Kabupaten Wonogiri	-1.48348	Kota Magelang	0.821796
Kabupaten Karanganyar	2.964285	Kota Surakarta	5.486931
Kabupaten Sragen	2.740384	Kota Salatiga	0.77634
Kabupaten Grobogan	-0.15314	Kota Semarang	-1.02417
Kabupaten Blora	-2.06555	Kota Pekalongan	-3.40474
Kabupaten Rembang	5.342502	Kota Tegal	-2.909
Kabupaten Pati	-2.57588		

Semakin tinggi nilai koefisien intersep pada suatu kabupaten/kota berarti semakin besar kabupaten/kota tersebut mengalami kemiskinan, dan semakin rendah nilai koefisien intersep pada suatu kabupaten/kota berarti semakin kecil kabupaten/kota tersebut mengalami kemiskinan. Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa kabupaten/kota yang memiliki nilai koefisien tertinggi terletak pada Kota Surakarta, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Wonosobo

yang berturut turut nilai koefisiennya adalah 5.486931, 5.342502, 5.237271, dan 5.120741. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki nilai koefisien terendah terletak pada Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Temanggung yang berturut turut nilai koefisiennya adalah -7.440818, -5.587004, -4.391024, dan -3.763891.

4.3.1 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama - Sama (Uji F)

Dari tabel 4.4 diketahui bahwa nilai f hitung statistik sebesar 196.8024 dan probabilitas sebesar 0,000. Pada tingkat signifikansi $\alpha : 5 \%$ maka koefisien f statistik tersebut signifikan karena $p = 0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, secara bersama atau simultan mengatakan Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

4.3.2 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji Hipotesis 1

Hipotesis 1 dalam penelitian mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan. Dari tabel 4.4 diketahui bahwa koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi sebesar -0.006793 dan probabilitas sebesar 0.7989. Pada tingkat signifikansi $\alpha : 5 \%$ maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena $p = 0,7989 > 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, pertumbuhan ekonomi

berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan **sehingga hipotesis 1 dalam penelitian ini tidak terbukti.**

Uji Hipotesis 2

Hipotesis 2 dalam penelitian mengatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan. Dari tabel 4.4 diketahui bahwa koefisien regresi variabel Indeks Pembangunan Manusia sebesar -0.761277 dan probabilitas sebesar 0,000. Pada tingkat signifikansi $\alpha : 5 \%$ maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $p = 0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, IPM terbukti berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan **sehingga hipotesis 2 dalam penelitian ini terbukti.**

Uji Hipotesis 3

Hipotesis 3 dalam penelitian mengatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan. Dari tabel 4.4 diketahui bahwa koefisien regresi variabel inflasi sebesar -0.099935 dan probabilitas sebesar 0,000. Pada tingkat signifikansi $\alpha : 5 \%$ maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $p = 0,000 > 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, inflasi terbukti berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan **sehingga hipotesis 3 dalam penelitian ini tidak terbukti.**

Uji Hipotesis 4

Hipotesis 4 dalam penelitian mengatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap variabel tingkat kemiskinan. Dari tabel 4.4 diketahui bahwa koefisien regresi variabel pengangguran sebesar 0.092779 dan probabilitas sebesar 0.0049. Pada tingkat signifikansi $\alpha : 5 \%$ maka koefisien regresi tersebut

signifikan karena $p = 0,0048 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, pengangguran terbukti berpengaruh positif terhadap variabel tingkat kemiskinan **sehingga hipotesis 4 dalam penelitian ini terbukti.**

4.3.3 Koefisien determinasi (Uji R²)

Besarnya nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.793390 memiliki arti bahwa pertumbuhan ekonomi, IPM, inflasi dan pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan sebesar 79,3 %. Sedangkan sisanya sebesar 20,7 % dipengaruhi oleh hal lain yang tidak di analisis dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, inflasi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2011 – 2016. Pembahasan masing-masing variabel disajikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis data di atas, diperoleh model yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah menggunakan random effect. Dari hasil pengujian model random effect disimpulkan bahwa:

1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap variabel Tingkat Kemiskinan

Dari hasil pengujian diketahui bahwa, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan **sehingga hipotesis 1 dalam penelitian ini tidak terbukti.**

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan karena pertumbuhan ekonomi tersebut belum efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut belum menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu belum terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat kerja sehingga pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan sebagaimana penelitian Yanti (2011).

Hal tersebut juga didukung oleh Barika (2013) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada lebih banyak ditopang oleh konsumsi daripada investasi atau modal. Pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan tersebut mencerminkan kurangnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang ada karena masih tidak mampu dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

2. IPM berpengaruh negatif terhadap variabel Tingkat Kemiskinan

Dari hasil pengujian diketahui bahwa IPM terbukti berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan **sehingga hipotesis 2 dalam penelitian ini terbukti.**

Hasil ini sesuai dengan teori pertumbuhan baru dimana didalam teori pertumbuhan baru, ditekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia. Pembangunan manusia identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk yang tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu meningkatkan produktivitas dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan (Lanjouw, 2001). Indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (longevity) dan hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup.

Hasil ini memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurmainah (2013), dan Noor Zuhdiyaty (2017) mengatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

3. Inflasi berpengaruh negatif terhadap variabel Tingkat Kemiskinan

Dari hasil pengujian diketahui bahwa inflasi terbukti berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan **sehingga hipotesis 3 dalam penelitian ini tidak terbukti**. Hasil ini tidak sesuai dengan teori dan hipotesis bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dapat dijelaskan dalam penelitian Latif Kharie (2007). Didalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa inflasi merupakan determinan makro ekonomi bagi perubahan kondisi kemiskinan di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang diikuti perbaikan distribusi pendapatan diantara kelompok penerima pendapatan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan pengeluaran konsumsi per kapita, sehingga disaat inflasi naik daya beli masyarakat tidak akan turun dan tingkat kemiskinan di negara atau suatu daerah dapat berkurang.

4. Pengangguran berpengaruh positif terhadap variabel Tingkat Kemiskinan

Dari hasil pengujian di atas diketahui, pengangguran terbukti berpengaruh positif terhadap variabel tingkat kemiskinan **sehingga hipotesis 4 dalam penelitian ini terbukti**.

Seperti yang diketahui bahwa pengangguran akan menimbulkan berbagai masalah seperti ekonomi dan sosial, yang berakibat pada tidak adanya pendapatan yang akhirnya dapat menyebabkan kesejahteraan masyarakat semakin merosot. Semakin menurunnya kesejahteraan akibat menganggur, dapat mengakibatkan

peluang terjebak dalam kemiskinan. Pendapat ini sesuai dengan Arsyad (2010) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Tingginya angka pengangguran, secara ekonomi berpotensi mengurangi kesempatan dalam peningkatan produktivitas regional, dan secara sosial mencerminkan semakin besarnya beban bagi masyarakat. Dengan demikian secara perlahan masyarakat akan terdorong pada kelompok penduduk miskin.

Selain itu pedoman yang digunakan sebagai acuan adalah pendapat dari Sadono (2004) yang menyatakan bahwa efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Banyak penelitian empiris yang menunjukkan bahwa sumber utama kemiskinan adalah pengangguran.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan untuk mengkaji pengaruh variabel-variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Inflasi, dan Pengangguran terhadap variabel dependen tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2011 - 2016, berdasarkan hasil analisis yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Model yang dipilih dalam penelitian ini adalah model random effect.
2. Pertumbuhan ekonomi, IPM, inflasi dan pengangguran secara bersama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan. Artinya kenaikan Pertumbuhan Ekonomi akan diikuti dengan penurunan kemiskinan.
4. IPM berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan. IPM yang semakin berkualitas akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan.
5. Inflasi berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan. Artinya perubahan distribusi pendapatan membuat disaat inflasi tinggi daya beli masyarakat tidak akan turun dan tingkat kemiskinan dapat berkurang.

6. Pengangguran berpengaruh positif terhadap variabel tingkat kemiskinan.

Artinya ketika pengangguran tinggi maka kemiskinan juga tinggi.

7. Besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.793390 memiliki arti bahwa pertumbuhan ekonomi, IPM, inflasi dan pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan sebesar 79,3 %. Sedangkan sisanya sebesar 20,7 % dipengaruhi oleh hal lain yang tidak di analisis dalam penelitian ini.

5.2 Implikasi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus membuat suatu kebijakan dan mengambil peranan yang cukup besar untuk dapat mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih maju dengan menaikkan kapasitas produksi masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Selain itu pemerintah provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu melakukan pemerataan pendapatan sehingga menyebar kesetiap golongan penduduk miskin yang ada di kota maupun di desa agar kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah merata. Diharapkan ke depan dapat dilaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan pendapatan serta pemerataan hasil-hasil ekonomi seluruh golongan masyarakat, serta dilakukan upaya peningkatan

pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah dengan mengandalkan potensi-potensi yang dimiliki. Dengan pertumbuhan ekonomi yang merata diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.

2. IPM

Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan lebih memberikan perhatian pada pembangunan manusia (human development) untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Diharapkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa lebih menggalakkan program pemberantasan buta aksara, memberikan bantuan dana untuk orang miskin misalkan dengan cara pemberian dana bantuan bagi pendirian sekolah - sekolah di daerah, sehingga pendidikan bisa merata ke seluruh daerah supaya dapat menekan kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah, serta meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyusun kurikulum sekolah yang lebih baik.

3. Inflasi

Pemerintah harus mengawasi dan menekan laju inflasi dengan cara kebijakan moneter atau dengan kebijakan fiskal. Salah satu contohnya adalah menurunkan pungutan pajak secara dinamis, menaikkan insentif bagi dunia usaha yang melakukan perdagangan internasional, kebijakan ekspor - impor yang secara positif dapat menurunkan tingkat inflasi, kebijakan pembangunan infrastruktur yang tidak menekan dunia usaha, dan lain-lain. Dampak positifnya, dapat

meningkatkan gairah sektor-sektor industri yang pada akhirnya penyerapan tenaga kerja meningkat; bukan justru memperbanyak PHK dan pengangguran.

4. Pengangguran

Tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, maka tingkat pengangguran juga harus diturunkan, penurunan tingkat pengangguran akan terlaksana jika lapangan pekerjaan tersedia. Diskriminasi instansi perusahaan/ pemerintahan dalam merekrut pegawai atau karyawan hendaknya dihilangkan, perekrutan yang benar-benar berdasarkan atas kemampuan bukan atas dasar kekerabatan, ras, suku, agama dan lainnya. Penyediaan lapangan pekerjaan yang berbasis dengan potensi-potensi yang masing-masing dimiliki wilayah harus ditingkatkan. Kesadaran dari masyarakat yang masih menganggur harus segera ditingkatkan, karena dengan hanya mengharapkan pemberian dari keluarga yang tidak menganggur dan memiliki penghasilan yang tinggi tidak akan meningkatkan kesejahteraan bagi individu yang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Disini pemerintah juga harus memperhatikan jumlah lapangan pekerjaan yang banyak sehingga bisa menekan angka pengangguran di Jawa Tengah.

5.3 Rekomendasi

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan masalah yang sama diharapkan mampu mengungkap, menambah dan melengkapi apa saja faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan khususnya di provinsi Jawa Tengah.



DAFTAR PUSTAKA

Bibliography

- (n.d.). Retrieved 2004, from World Bank: <http://www.worldbank.org/>
- (n.d.). Retrieved from <https://www.bps.go.id/>.
- (n.d.). Retrieved from <http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/jateng/Pages/Kajian-Ekonomi-dan-Kuangan-Regional-Provinsi-Jawa-Tengah-Februari-2017.aspx>.
- (n.d.). Retrieved 2004, from www.bappenas.go.id: <https://www.bappenas.go.id/id/>
- (UNDP), U. N. (1995). *The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia*.
- Adi Widodo, d. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1, 25 - 42.
- Amalia, F. (2012). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/econosains/article/view/629>, 158 - 167.
- Arianti, A. Y. (2012). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004 - 2009. *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, 1.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Barika. (n.d.). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Se Sumatra. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, 27 - 36.
- Boediono. (1999). *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.4: Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Christianto, T. (2013). Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Riau. *VII*.
- Dermoredjo, P. S. (2003). *Produksi Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan, Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia* (Vol. 51).

- Dewi, N. K. (2016). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 63 - 68.
- Duwila, U. (2016). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). *Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi*, X.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometrika Dasar*. (Z. Sumarno, Trans.) Jakarta: Erlangga.
- Inggit, D. P. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2004 - 2014. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, I, 257 - 282.
- Karim, A. A. (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kharie, L. (2007). Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Kemiskinan di Indonesia 1976 - 2005. *I*.
- Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
- Kuznets, S. (1955). "Economic Growth and Income Inequality,". *American Economic Review*.
- Lanjouw. (2001). Poverty, Education and Health in Indonesia. Who Benefits from public spending?
- Lewis, O. (1996). "The Culture of Poverty". In G. Gmelch and W. Zenner, eds. *Urban Life*. Waveland Press.
- Mahsunah, D. (2013). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Mahasiswa Unesa*.
- Manurung, P. R. (2006). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)* (Vol. III). Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mubyarto. (2004). Kemiskinan, Pengangguran, dan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Dinamika Masyarakat*, III.

- Mudrajad, K. (1997). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Noor Zuhdiyaty, D. K. (2017, Februari 2). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi). *JIBEKA*, 11, 27 - 31.
- Nurmainah, S. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, XX, 131 - 141.
- Oye, D. (2012). Inflasi dan Kemiskinan di Nigeria: Peran ICT di Kemiskinan Pengurangan. *Universal Jurnal Manajemen dan Ilmu Sosial*, 2, 21 - 28.
- Prastisto, A. (2004). *Cara Mudah Mengatasi Statistik dan Rancangan Percobaan dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Programme, U. N. (1995). *The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia*.
- Puspita, D. W. (2015). Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *JEJAK*.
- Sadono, S. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Sebayang, R. d. (2013). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Economia*, IX.
- Sinaga, R. K. (2009). Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Indonesia. *Ejournal Economics*.
- Sindi Paramita Sari, D. A. (2016). Analisis PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004 - 2013. *I- Economic*, II.
- Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Raja Grafindo Pustaka.
- Suryawati, C. (2005, September 03). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *JPMK*, 08.

- Suryowati, P. M. (2018). Aplikasi Metode Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect Untuk Menganalisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Statistika Industri dan Komputasi*, 3.
- Tarigan, R. (2004). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahyuniarti, H. S. (2008). Pengaruh Pengupahan Sebagai Langkah Strategis Stabilitas Dalam Hubungan Industrial.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya: Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wiguna, V. I. (2013). Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2005 - 2010.
- Wijayanto, R. D. (2010). Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005 - 2008. <http://eprints.undip.ac.id/23008/1/SKRIPSI.PDF>, 17.
- Wijayanto, R. D. (2010). Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005 -2008.
- Wongdesmiwati. (2009). *Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia : Analisis Ekonometrika*. Retrieved November 28, 2017, from wongdesmiwati.files.wordpress.com
- Wulandari, F. H. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2008 - 2012. *E-Journal UAY*.
- Yanti, N. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1999 - 2009. <http://repository.upnyk.ac.id/1662/>, 1-57.

LAMPIRAN

Data Observasi Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi, dan Pengangguran 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2011-2016.

Kabupaten/Kota	Tahun	TK (%)	PE (%)	IPM	INF (%)	PG (%)
Kabupaten Cilacap	2011	17.15	4,07	64.73	5.27	10.82
Kabupaten Cilacap	2012	15.92	1,98	65.72	6.87	7.29
Kabupaten Cilacap	2013	15.24	1,66	66.8	8.37	6.68
Kabupaten Cilacap	2014	14.21	2,92	67.25	8.19	5.65
Kabupaten Cilacap	2015	14.39	5,94	67.77	2.63	8.01
Kabupaten Cilacap	2016	14.12	5,06	68.6	2.77	7.58
Kabupaten Banyumas	2011	21.11	6,61	67.45	3.4	6.61
Kabupaten Banyumas	2012	19.44	5,88	68.06	4.73	5.11
Kabupaten Banyumas	2013	18.44	6,97	68.55	8.5	5.45
Kabupaten Banyumas	2014	17.45	5,67	69.25	7.09	5.37
Kabupaten Banyumas	2015	17.52	6,12	69.89	2.52	6.37
Kabupaten Banyumas	2016	17.23	6,05	70.49	2.42	6.1
Kabupaten Purbalingga	2011	23.06	5,67	64.33	4.47	5.1
Kabupaten Purbalingga	2012	21.19	5,79	64.94	4.09	5.02
Kabupaten Purbalingga	2013	20.53	5,27	65.53	9.57	5.63
Kabupaten Purbalingga	2014	19.75	4,85	66.23	9.08	5.13
Kabupaten Purbalingga	2015	19.7	5,43	67.03	1.62	4.84
Kabupaten Purbalingga	2016	18.98	4,75	67.48	2.39	4.38
Kabupaten Banjarnegara	2011	20.38	5,44	61.58	4.73	4.97
Kabupaten Banjarnegara	2012	18.87	5,23	62.29	4.55	3.69
Kabupaten Banjarnegara	2013	18.71	5,44	62.84	8.35	4.16
Kabupaten Banjarnegara	2014	17.77	5,31	63.15	7.78	4.06
Kabupaten Banjarnegara	2015	18.37	5,47	64.73	2.97	5.05
Kabupaten Banjarnegara	2016	17.46	5,41	65.52	2.87	4.86
Kabupaten Kebumen	2011	24.06	6,15	64.05	4.52	4.73
Kabupaten Kebumen	2012	22.4	4,88	64.47	4.64	3.58
Kabupaten Kebumen	2013	21.32	4,57	64.86	10.46	3.52
Kabupaten Kebumen	2014	20.5	5,79	65.67	7.36	3.25
Kabupaten Kebumen	2015	20.44	6,28	66.87	2.91	4.14
Kabupaten Kebumen	2016	19.86	4,97	67.41	2.71	3.88
Kabupaten Purworejo	2011	17.51	5,64	69.11	2.52	5.3
Kabupaten Purworejo	2012	16.32	4,59	69.4	3.66	3.2
Kabupaten Purworejo	2013	15.44	4,94	69.77	7.14	5.15
Kabupaten Purworejo	2014	14.41	4,48	70.12	8.48	5.1
Kabupaten Purworejo	2015	14.27	5,37	70.37	3.45	4.01

Kabupaten Purworejo	2016	13.91	5,15	70.66	2.66	3.78
Kabupaten Wonosobo	2011	24.21	5,37	63.07	2.66	4.92
Kabupaten Wonosobo	2012	22.5	4,70	64.18	3.84	5.21
Kabupaten Wonosobo	2013	22.08	4,00	64.57	8.82	5.82
Kabupaten Wonosobo	2014	21.42	4,78	65.2	8.44	5.34
Kabupaten Wonosobo	2015	21.45	4,85	65.7	2.71	4.47
Kabupaten Wonosobo	2016	20.53	5,25	66.19	2.97	3.87
Kabupaten Magelang	2011	15.18	6,68	64.16	2.64	6.83
Kabupaten Magelang	2012	13.97	4,88	64.75	2.59	4.38
Kabupaten Magelang	2013	13.96	5,91	65.86	8.34	6.13
Kabupaten Magelang	2014	12.98	5,38	66.35	7.91	7.45
Kabupaten Magelang	2015	13.07	5,03	67.13	3.6	5.16
Kabupaten Magelang	2016	12.67	5,40	67.85	2.86	4.87
Kabupaten Boyolali	2011	14.97	6,34	69.14	3.35	5.81
Kabupaten Boyolali	2012	13.88	5,33	69.51	3.45	4.43
Kabupaten Boyolali	2013	13.27	5,83	69.81	8.21	5.44
Kabupaten Boyolali	2014	12.36	5,42	70.34	7.45	4.95
Kabupaten Boyolali	2015	12.45	5,91	71.74	2.58	2.03
Kabupaten Boyolali	2016	12.09	5,27	72.18	2.65	3.25
Kabupaten Klaten	2011	17.95	6,29	71.16	1.67	7.63
Kabupaten Klaten	2012	16.71	5,71	71.71	3.65	3.7
Kabupaten Klaten	2013	15.6	5,96	72.42	7.92	5.34
Kabupaten Klaten	2014	14.56	5,84	73.19	7.76	4.75
Kabupaten Klaten	2015	14.89	5,30	73.81	2.57	2.51
Kabupaten Klaten	2016	14.46	5,14	73.97	2.31	2.34
Kabupaten Sukoharjo	2011	11.13	5,88	72.34	2.63	6.27
Kabupaten Sukoharjo	2012	10.15	5,90	72.81	4.22	6.1
Kabupaten Sukoharjo	2013	9.87	5,78	73.22	8.42	5.98
Kabupaten Sukoharjo	2014	9.18	5,40	73.76	7.93	4.6
Kabupaten Sukoharjo	2015	9.26	5,69	74.53	2.69	4.52
Kabupaten Sukoharjo	2016	9.07	5,67	75.06	2.34	4.2
Kabupaten Wonogiri	2011	15.74	3,58	64.75	3	3.82
Kabupaten Wonogiri	2012	14.67	5,94	65.75	3.43	3.46
Kabupaten Wonogiri	2013	14.02	4,78	66.4	8.6	3.61
Kabupaten Wonogiri	2014	13.09	5,26	66.77	7.2	3.45
Kabupaten Wonogiri	2015	12.98	5,40	67.76	2.13	3.07
Kabupaten Wonogiri	2016	13.12	5,22	68.23	2.94	3.25
Kabupaten Karanganyar	2011	15.29	4,95	71	3.31	5.78
Kabupaten Karanganyar	2012	14.07	5,90	72.26	3.29	5.82
Kabupaten Karanganyar	2013	13.58	5,69	73.33	8.7	3.84
Kabupaten Karanganyar	2014	12.62	5,22	73.89	7.38	3.54
Kabupaten Karanganyar	2015	12.46	5,05	74.26	2.4	3.6

Kabupaten Karanganyar	2016	12.49	5,37	74.9	1.93	3.83
Kabupaten Sragen	2011	17.95	6,55	68.12	2.86	8.43
Kabupaten Sragen	2012	16.72	6,12	68.91	3.74	5.88
Kabupaten Sragen	2013	15.93	6,70	69.95	7.55	5.63
Kabupaten Sragen	2014	14.87	5,59	70.52	8.51	6.04
Kabupaten Sragen	2015	14.86	6,05	71.1	3.05	4.51
Kabupaten Sragen	2016	14.38	5,72	71.43	2.49	4.21
Kabupaten Grobogan	2011	17.38	3,19	65.41	1.86	5.33
Kabupaten Grobogan	2012	16.13	5,08	66.39	4.48	4.2
Kabupaten Grobogan	2013	14.87	4,57	67.43	7.88	6.1
Kabupaten Grobogan	2014	13.86	4,07	67.77	8.03	4.25
Kabupaten Grobogan	2015	13.68	5,96	68.05	3.31	5.22
Kabupaten Grobogan	2016	13.57	4,46	68.52	2.41	5.1
Kabupaten Blora	2011	16.24	4,42	63.88	2.26	6.9
Kabupaten Blora	2012	15.1	4,90	64.7	3.55	4.75
Kabupaten Blora	2013	14.64	5,36	65.37	7.94	6.23
Kabupaten Blora	2014	13.66	4,39	65.84	7.13	4.3
Kabupaten Blora	2015	13.52	5,36	66.22	2.85	4.68
Kabupaten Blora	2016	13.33	23,53	66.61	2.14	4.5
Kabupaten Rembang	2011	23.71	5,19	65.36	2.73	7.22
Kabupaten Rembang	2012	21.88	5,32	66.03	4.28	5.75
Kabupaten Rembang	2013	20.97	5,43	66.84	6.88	5.97
Kabupaten Rembang	2014	19.5	5,15	67.4	7.59	5.23
Kabupaten Rembang	2015	19.28	5,50	68.18	2.66	4.51
Kabupaten Rembang	2016	18.54	5,23	68.6	1.75	4.15
Kabupaten Pati	2011	14.69	5,91	65.71	2.3	11.17
Kabupaten Pati	2012	13.61	5,93	66.13	3.92	11.98
Kabupaten Pati	2013	12.94	5,97	66.47	7.57	7.29
Kabupaten Pati	2014	12.06	4,64	66.99	8.01	6.37
Kabupaten Pati	2015	11.95	5,94	68.51	3.23	4.43
Kabupaten Pati	2016	11.65	5,20	69.03	2.31	4.26
Kabupaten Kudus	2011	9.45	4,24	69.89	3.34	8.32
Kabupaten Kudus	2012	8.63	4,11	70.57	4.77	5.89
Kabupaten Kudus	2013	8.62	4,36	71.58	8.31	8.07
Kabupaten Kudus	2014	7.99	4,43	72	8.59	5.03
Kabupaten Kudus	2015	7.73	3,90	72.72	3.28	5.04
Kabupaten Kudus	2016	7.65	2,53	72.94	2.32	4.89
Kabupaten Jepara	2011	10.32	4,92	67.63	3.59	5.48
Kabupaten Jepara	2012	9.38	5,86	68.45	4.52	4.29
Kabupaten Jepara	2013	9.23	5,39	69.11	7.95	6.34
Kabupaten Jepara	2014	8.55	4,81	69.61	9.87	5.09
Kabupaten Jepara	2015	8.5	5,04	70.02	4.57	3.12

Kabupaten Jepara	2016	8.35	5,02	70.25	3.45	2.98
Kabupaten Demak	2011	18.21	5,39	66.84	3.49	5.03
Kabupaten Demak	2012	16.73	4,46	67.55	4.1	8.4
Kabupaten Demak	2013	15.72	5,27	68.38	8.22	7.08
Kabupaten Demak	2014	14.6	4,29	68.95	8.69	5.17
Kabupaten Demak	2015	14.44	5,93	69.75	2.8	6.02
Kabupaten Demak	2016	14.1	5,04	70.1	2.27	5.5
Kabupaten Semarang	2011	10.3	6,27	70.35	3.29	6.16
Kabupaten Semarang	2012	9.4	6,03	70.88	4.56	4.87
Kabupaten Semarang	2013	8.51	5,97	71.29	8.11	3.9
Kabupaten Semarang	2014	8.05	5,85	71.65	8.63	4.38
Kabupaten Semarang	2015	8.15	5,52	71.89	2.85	2.57
Kabupaten Semarang	2016	7.99	5,27	72.4	2.39	2.45
Kabupaten Temanggung	2011	13.38	6,09	64.14	2.42	3.54
Kabupaten Temanggung	2012	12.32	4,27	64.91	4.73	3.39
Kabupaten Temanggung	2013	12.42	5,20	65.52	7.01	4.87
Kabupaten Temanggung	2014	11.55	5,03	65.97	7.81	3.19
Kabupaten Temanggung	2015	11.76	5,21	67.07	2.74	1.5
Kabupaten Temanggung	2016	11.6	5,00	67.6	2.42	1.35
Kabupaten Kendal	2011	14.26	6,57	66.96	3.49	6.54
Kabupaten Kendal	2012	13.17	5,21	67.55	3.89	6.31
Kabupaten Kendal	2013	12.68	6,22	67.98	6.9	6.43
Kabupaten Kendal	2014	11.8	5,14	68.46	8.34	6.15
Kabupaten Kendal	2015	11.62	5,25	69.57	4.13	7.07
Kabupaten Kendal	2016	11.37	5,60	70.11	2.47	6.75
Kabupaten Batang	2011	13.47	6,12	62.59	3.01	6.66
Kabupaten Batang	2012	12.4	4,62	63.09	3.83	5.88
Kabupaten Batang	2013	11.96	5,88	63.6	8.08	7.02
Kabupaten Batang	2014	11.13	5,31	64.07	7.66	7.42
Kabupaten Batang	2015	11.27	5,42	65.46	2.94	4.56
Kabupaten Batang	2016	11.04	4,93	66.38	2.24	4.2
Kabupaten Pekalongan	2011	15	5,66	64.72	2.65	6.91
Kabupaten Pekalongan	2012	13.85	4,81	65.33	2.96	5.08
Kabupaten Pekalongan	2013	13.51	5,99	66.26	8.18	4.78
Kabupaten Pekalongan	2014	12.57	4,95	66.98	8.32	6.03
Kabupaten Pekalongan	2015	12.84	4,78	67.4	3.42	5.1
Kabupaten Pekalongan	2016	12.9	5,16	67.71	2.96	5.55
Kabupaten Pemalang	2011	20.68	5,01	59.66	2.8	7.37
Kabupaten Pemalang	2012	19.27	5,32	60.78	4.04	4.85
Kabupaten Pemalang	2013	19.27	5,57	61.81	6.52	6.48
Kabupaten Pemalang	2014	18.44	5,52	62.35	7.38	7.44
Kabupaten Pemalang	2015	18.3	5,58	63.7	3.52	6.53

Kabupaten Pemalang	2016	17.58	5,38	64.17	2.33	6.3
Kabupaten Tegal	2011	11.54	6,39	61.97	2.74	10.59
Kabupaten Tegal	2012	10.75	5,23	62.67	4.13	6.12
Kabupaten Tegal	2013	10.58	6,73	63.5	7.79	6.89
Kabupaten Tegal	2014	9.87	5,03	64.1	8.48	8.47
Kabupaten Tegal	2015	10.09	5,45	65.04	3.64	9.52
Kabupaten Tegal	2016	10.1	6,37	65.84	2.67	9.6
Kabupaten Brebes	2011	22.72	6,65	60.51	3.09	11.08
Kabupaten Brebes	2012	21.12	4,58	60.92	4.61	8.22
Kabupaten Brebes	2013	20.82	5,91	61.87	9.83	9.61
Kabupaten Brebes	2014	20	5,30	62.55	6.2	9.53
Kabupaten Brebes	2015	19.79	5,98	63.18	3.08	6.49
Kabupaten Brebes	2016	19.47	4,87	63.98	2.84	5.88
Kota Magelang	2011	11.06	6,11	74.47	4.15	11.51
Kota Magelang	2012	10.31	5,37	75	6.05	8.99
Kota Magelang	2013	9.8	6,04	75.29	7.79	6.75
Kota Magelang	2014	9.14	4,98	75.79	7.92	7.38
Kota Magelang	2015	9.05	5,11	76.39	2.7	6.43
Kota Magelang	2016	8.79	5,17	77.16	2.25	6.21
Kota Surakarta	2011	12.9	6,42	78	1.93	7.7
Kota Surakarta	2012	12	5,58	78.44	2.87	6.29
Kota Surakarta	2013	11.74	6,25	78.89	8.32	7.22
Kota Surakarta	2014	10.95	5,28	79.34	8.01	6.16
Kota Surakarta	2015	10.89	5,44	80.14	2.56	4.53
Kota Surakarta	2016	10.88	5,32	80.76	2.15	4.35
Kota Salatiga	2011	7.8	6,58	78.76	2.84	9.02
Kota Salatiga	2012	7.11	5,53	79.1	4.12	6.84
Kota Salatiga	2013	6.4	6,30	79.37	7.67	6.21
Kota Salatiga	2014	5.93	5,57	79.98	7.84	4.46
Kota Salatiga	2015	5.8	5,17	80.96	2.61	6.43
Kota Salatiga	2016	5.24	5,23	81.14	2.19	6.2
Kota Semarang	2011	5.68	6,58	77.58	2.87	7.65
Kota Semarang	2012	5.13	5,97	78.04	0.41	6.01
Kota Semarang	2013	5.25	6,25	78.68	8.19	6.02
Kota Semarang	2014	5.04	6,31	79.24	8.53	7.76
Kota Semarang	2015	4.97	5,80	80.23	2.56	5.77
Kota Semarang	2016	4.85	5,69	81.19	2.32	5.35
Kota Pekalongan	2011	10.04	5,49	69.54	2.45	8.06
Kota Pekalongan	2012	9.47	5,61	69.95	3.55	7.67
Kota Pekalongan	2013	8.26	5,91	70.82	7.4	5.28
Kota Pekalongan	2014	8.02	5,48	71.53	7.82	5.42
Kota Pekalongan	2015	8.09	5,00	72.69	3.46	4.1

Kota Pekalongan	2016	7.92	5,36	73.32	2.94	3.68
Kota Tegal	2011	10.81	6,47	70.03	2.58	9.77
Kota Tegal	2012	10.04	4,21	70.68	0.4	8.75
Kota Tegal	2013	8.84	5,67	71.44	5.8	9.32
Kota Tegal	2014	8.54	5,04	72.2	7.4	9.2
Kota Tegal	2015	8.26	5,45	72.96	3.95	8.06
Kota Tegal	2016	8.2	5,46	73.55	2.71	7.6

Lampiran II

Analisis Statistik Deskriptif

	TK	PE	IPM	INF	PG
Mean	13.77600	5.442238	69.02348	4.743143	5.709524
Median	13.51500	5.385000	68.20500	3.595000	5.430000
Maximum	24.21000	23.53000	81.19000	10.46000	11.98000
Minimum	4.850000	1.660000	59.66000	0.400000	1.350000
Std. Dev.	4.504289	1.469315	4.714844	2.472127	1.892213
Skewness	0.227329	8.708609	0.684686	0.545838	0.723613
Kurtosis	2.372511	111.0027	3.048724	1.763704	3.794759
Jarque-Bera	5.253995	104719.5	16.42858	23.80161	23.85341
Probability	0.072295	0.000000	0.000271	0.000007	0.000007
Sum	2892.960	1142.870	14494.93	996.0600	1199.000
Sum Sq. Dev.	4240.322	451.2072	4646.019	1277.285	748.3182
Observations	210	210	210	210	210

Hasil Estimasi Common Effect Models

Dependent Variable: TK
Method: Panel Least Squares
Date: 03/03/18 Time: 13:32
Sample: 2011 2016
Periods included: 6
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE	0.010674	0.158995	0.067135	0.9465
IPM	-0.646828	0.049353	-13.10623	0.0000
INF	-0.072801	0.094646	-0.769187	0.4427
PG	-0.210014	0.122873	-1.709200	0.0889
C	59.90860	3.638234	16.46639	0.0000
R-squared	0.458196	Mean dependent var	13.77600	
Adjusted R-squared	0.447624	S.D. dependent var	4.504289	
S.E. of regression	3.347677	Akaike info criterion	5.277932	
Sum squared resid	2297.423	Schwarz criterion	5.357625	
Log likelihood	-549.1829	Hannan-Quinn criter.	5.310149	
F-statistic	43.34140	Durbin-Watson stat	0.041517	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil Estimasi Fixed Effect Models

Dependent Variable: TK
Method: Panel Least Squares
Date: 03/03/18 Time: 13:33
Sample: 2011 2016
Periods included: 6
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE	-0.006717	0.026643	-0.252103	0.8013
IPM	-0.769099	0.035942	-21.39814	0.0000
INF	-0.100290	0.014207	-7.059091	0.0000
PG	0.091415	0.033092	2.762406	0.0064
C	66.85219	2.587688	25.83472	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.990122	Mean dependent var	13.77600
Adjusted R-squared	0.987926	S.D. dependent var	4.504289
S.E. of regression	0.494933	Akaike info criterion	1.597197
Sum squared resid	41.88797	Schwarz criterion	2.218802
Log likelihood	-128.7057	Hannan-Quinn criter.	1.848489
F-statistic	451.0353	Durbin-Watson stat	1.235250
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil Estimasi Random Effect Models

Dependent Variable: TK
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 03/03/18 Time: 13:34
 Sample: 2011 2016
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 210
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE	-0.006793	0.026626	-0.255105	0.7989
IPM	-0.761277	0.034573	-22.01938	0.0000
INF	-0.099935	0.014204	-7.035461	0.0000
PG	0.092779	0.032621	2.844138	0.0049
C	66.30324	2.557452	25.92551	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			3.471614	0.9801
Idiosyncratic random			0.494933	0.0199
Weighted Statistics				
R-squared	0.793390	Mean dependent var		0.800439
Adjusted R-squared	0.789359	S.D. dependent var		1.075746
S.E. of regression	0.493720	Sum squared resid		49.97077
F-statistic	196.8024	Durbin-Watson stat		1.032431
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.426453	Mean dependent var		13.77600
Sum squared resid	2432.022	Durbin-Watson stat		0.021213

Hasil Pengujian Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	270.818029	(34,171)	0.0000
Cross-section Chi-square	840.954435	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: TK

Method: Panel Least Squares

Date: 03/03/18 Time: 13:29

Sample: 2011 2016

Periods included: 6

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE	0.010674	0.158995	0.067135	0.9465
IPM	-0.646828	0.049353	-13.10623	0.0000
INF	-0.072801	0.094646	-0.769187	0.4427
PG	-0.210014	0.122873	-1.709200	0.0889
C	59.90860	3.638234	16.46639	0.0000
R-squared	0.458196	Mean dependent var		13.77600
Adjusted R-squared	0.447624	S.D. dependent var		4.504289
S.E. of regression	3.347677	Akaike info criterion		5.277932
Sum squared resid	2297.423	Schwarz criterion		5.357625
Log likelihood	-549.1829	Hannan-Quinn criter.		5.310149
F-statistic	43.34140	Durbin-Watson stat		0.041517
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.996580	4	0.5584

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PE	-0.006717	-0.006793	0.000001	0.9356
IPM	-0.769099	-0.761277	0.000097	0.4260
INF	-0.100290	-0.099935	0.000000	0.2024
PG	0.091415	0.092779	0.000031	0.8063

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: TK

Method: Panel Least Squares

Date: 03/03/18 Time: 13:40

Sample: 2011 2016

Periods included: 6

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66.85219	2.587688	25.83472	0.0000
PE	-0.006717	0.026643	-0.252103	0.8013
IPM	-0.769099	0.035942	-21.39814	0.0000
INF	-0.100290	0.014207	-7.059091	0.0000
PG	0.091415	0.033092	2.762406	0.0064

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.990122	Mean dependent var	13.77600
Adjusted R-squared	0.987926	S.D. dependent var	4.504289
S.E. of regression	0.494933	Akaike info criterion	1.597197
Sum squared resid	41.88797	Schwarz criterion	2.218802
Log likelihood	-128.7057	Hannan-Quinn criter.	1.848489
F-statistic	451.0353	Durbin-Watson stat	1.235250
Prob(F-statistic)	0.000000		